ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN
Alliance of Independent Journalist

IFJ

BBC MEDIA ACTION

brave media
SUPPORTING INDEPENDENT MEDIA WORLDWIDE

Co-funded by the European Union

DAYA TAHAN, RISIKO DAN TANTANGAN KE DEPAN:

Laporan tentang Keberlanjutan Media di Indonesia

(Risk, Resilience and Futures: A Report on Media Viability in Indonesia)



DAYA TAHAN, RISIKO DAN TANTANGAN KE DEPAN:

Laporan tentang Keberlanjutan Media di Indonesia

(Risk, Resilience and Futures: A Report on Media Viability in Indonesia)

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia

November 2026

Daya Tahan, Risiko dan Tantangan Ke Depan: Laporan tentang Keberlanjutan Media di Indonesia

(Risk, Resilience and Futures: A Report on Media Viability in Indonesia)

Tim Penyusun:
Masduki
Febrina Galuh Permanasari
Heru Margianto
Luviana Ariyanti
Rini Yustiningsih
Tri Joko Her Riadi

Editor:
Masduki

Tim Sekretariat:
Aprida Minda Mora
Putri Adenia

Desain dan Tata Letak:
Fahrul Rozi

Diterbitkan pertama kali oleh:

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia 2026
Jl.Kembang Raya No. 6 Kwitang Senen Jakarta Pusat 10420
Telp. +62 21 315 1214. Fax 3151261
Email: sekretariat@ajindonesia.or.id
Web: www.aji.or.id

66 Halaman. : 21 x 29,7 cm

Apabila di dalam buku ini terdapat kesalahan cetak/produksi atau kesalahan informasi, mohon agar menghubungi penerbit.

Pengantar

Di Persimpangan Krisis: Menakar Keberlanjutan Media di Indonesia

Krisis media dan jurnalisme bukan lagi sekadar persoalan bisnis. Ia merupakan persoalan demokrasi, kebebasan berekspresi, dan hak publik untuk memperoleh informasi yang berkualitas. Ketika media menghadapi tekanan ekonomi, disrupsi digital, serta konsentrasi kepemilikan dan kekuatan platform digital, yang dipertaruhkan bukan hanya keberlangsungan sebuah perusahaan media, melainkan juga masa depan jurnalisme independen.

Dalam beberapa tahun terakhir, industri media di Indonesia menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Perubahan model bisnis, penurunan pendapatan iklan, ketergantungan pada platform digital, gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK), memburuknya kondisi kerja jurnalis, hingga meningkatnya tekanan terhadap independensi redaksi menjadi gambaran nyata krisis tersebut. Di tengah situasi ini, banyak media, terutama media alternatif dan media lokal, berjuang mempertahankan keberadaannya dengan sumber daya yang terbatas. Padahal, keberadaan media yang beragam, independen, dan berkelanjutan merupakan salah satu prasyarat penting bagi demokrasi yang sehat.

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia memandang bahwa keberlanjutan media atau *media viability* harus ditempatkan dalam perspektif yang lebih luas daripada sekadar kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan. Media yang berkelanjutan bukan hanya media yang mampu bertahan secara finansial, tetapi juga media yang menjaga independensi redaksi, memenuhi standar etika jurnalistik, melindungi hak-hak pekerjanya, menjamin keberagaman perspektif, serta menjalankan fungsi kontrol terhadap kekuasaan.

Karena itu, membicarakan keberlanjutan media tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab negara. Pemerintah harus hadir menciptakan ekosistem yang adil, melindungi kemerdekaan pers, memastikan keadilan ekonomi digital, serta mencegah praktik monopoli dan ketimpangan relasi antara perusahaan media dan platform. Namun, intervensi negara tidak boleh menjadi pintu masuk bagi pengendalian isi pemberitaan maupun pembatasan independensi pers.

Laporan riset (selanjutnya disebut asesmen) berjudul Risiko, Ketahanan, dan Masa Depan: Laporan tentang Keberlanjutan Media di Indonesia ini adalah asesmen evaluatif atas ketangguhan (viability) media jurnalisme alternatif di Indonesia, dengan menggunakan *Media Viability Indicators* (MVI) yang dirumuskan kelompok kerja MVI AJI Indonesia. Asesmen ini bersifat deskriptif dan eksploratif: ia memotret kondisi objektif media dan ekosistem pendukungnya, bukan menguji hipotesis atau membandingkan kinerja antar-media.

Asesmen ini merupakan salah satu upaya untuk memahami kondisi keberlanjutan media di Indonesia sekaligus membangun kerangka pengukuran *media viability* yang sesuai dengan konteks nasional. Melalui kolaborasi AJI Indonesia, BBC Media Action, dan International Federation of Journalists (IFJ), kajian ini diharapkan memperkaya diskusi, menghadirkan bukti, dan menjadi dasar reformasi kebijakan yang melibatkan pemerintah, pelaku industri media, organisasi jurnalis, masyarakat sipil, serta komunitas pendukung kebebasan pers.

AJI percaya, menyelamatkan media bukan semata-mata menyelamatkan industri. Ini upaya menjaga hak publik atas informasi, mempertahankan ruang demokrasi, dan memastikan jurnalisme tetap menjadi kekuatan yang independen untuk mengawasi kekuasaan. Tanpa media yang merdeka dan berkelanjutan, demokrasi akan kehilangan salah satu pilar pentingnya.

Selamat membaca

Nany Afrida
(Ketua Umum AJI Indonesia)

Daftar Isi

Pengantar Ketua Umum AJI Indonesia 3

Daftar Isi 5

Ringkasan Eksekutif 6

BAB I PENDAHULUAN 11

a. Kondisi Umum Media Jurnalisme 11
b. Media Alternatif Sebagai Fokus 13
c. Urgensi dan Indikator *Media Viability* 15

BAB II METODOLOGI ASESMEN 23

a. Kerangka Pikir Asesmen 23
b. Metode Pelaksanaan Asesmen 23
c. Tahapan Kerja Asesmen 28
d. Keterbatasan 30
e. Panduan Umum Asesmen 31

BAB III TEMUAN UTAMA ASESMEN 35

a. Konten Berkualitas
(Laporan utama dan Sub indikator) 35
b. Pelibatan Publik
(Laporan utama dan Sub indikator) 39
c. Penguatan Organisasi
(Laporan utama dan Sub indikator) 42
d. Keberlanjutan Finansial
(Laporan utama dan Sub indikator) 44
e. Adaptasi Teknologi
(Laporan utama dan Sub indikator) 47
f. Perlindungan Hukum dan Keterbukaan Informasi
(Laporan utama dan Sub indikator) 54

BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 61

Daftar Pustaka 65

Bahan Bacaan 66

RINGKASAN EKSEKUTIF

Indonesia termasuk negara dengan kategori transisi demokrasi, atau *flaw democracy*, suatu kondisi yang masih kabur antara sistem politik yang otoriter dengan demokrasi yang masih berjalan secara prosedural. Dalam suasana politik ini, sektor media dan jurnalisme terdampak langsung, baik dalam bisnis informasi maupun kerja produksi berita sebagai layanan publik. Dalam sistem politik demokratis, media massa memiliki fungsi sosial sebagai ruang publik mendiskusikan berbagai isu kepublikan. Fungsi ini diwujudkan melalui berita yang berkualitas dan kolom komentar publik yang terbuka dan setara. Produk utama media adalah berita dan peran kunci dari berita adalah melakukan kontrol terhadap kekuasaan agar tidak terjadi penyimpangan. Peran ini hanya bisa dimainkan oleh media yang modal produksinya berasal dari kemitraan dengan pihak yang peduli kepada berita dan jurnalisme sebagai investasi pengetahuan.

Masalahnya, ada atensi yang rendah terhadap media jurnalisme dan literasi berita yang juga rendah di publik, dipicu COVID-19 dan disrupsi digital, terjadi krisis pendapatan keuangan media arus utama yang berdampak pada krisis produksi berita. Krisis terjadi pada jantungnya: biaya produksi dan diseminasi berita. Akibat efisiensi, produk jurnalistik berkualitas yang berbiaya tinggi mengalami pengurangan bahkan tersingkir. Upaya pemerintah untuk memberi subsidi terhadap media berita masih terbatas dan memiliki resiko politik. Memperhatikan kondisi ini, potret media dan jurnalisme berkualitas sedang tidak sehat atau tangguh.

Media berita secara global tercatat sebagai sektor yang mengalami krisis terus menerus baik oleh bencana ekologis, kesehatan maupun krisis politik lokal (Scott, Bunce, Wrigt, 2019). Prakarsa menyelamatkan media dari krisis berkepajangan misalnya antara lain tersimpul dalam dokumen bernama: media viability index (MVI), yang diterbitkan Deutsche Welle (DW) di Jerman pada tahun 2020. MVI ini didukung oleh UNESCO dan diharapkan menjadi indikator mengukur keberlangsungan media secara umum, dan jurnalisme secara khusus sebagai entitas bisnis dan sosial. Keberlangsungan (secara bisnis) dan reputasi (institusi) media di publik menjadi nilai utama. Kedua nilai ini saling berpengaruh dan menentukan masa depan media.

Setelah melakukan kajian atas konsep dan implementasi *media viability* asesmen di berbagai negara, dan memperhatikan kondisi empiris media dan jurnalisme di Indonesia, maka kelompok kerja memilih enam indikator *media viability* yang diukur sebagai berikut. Konten yang berkualitas; Pelibatan Publik; Penguatan Organisasi; Keberlanjutan Finansial; Adaptasi Teknologi: Pengakuan dan Perlindungan Hukum. Seluruh indikator yang diuraikan di sini sudah melingkuoi dua sisi: internal pengelola

media alternatif dan eksternal (pemerintah, Dewan Pers, aktor strategis di lingkup media jurnalisme dan publik secara luas).

Riset ini merupakan kerja asesmen evaluatif atas ketangguhan *(viability)* media jurnalisme alternatif di Indonesia, dengan menggunakan rujukan pada *Media Viability Indicators* (MVI) yang telah dirumuskan kelompok kerja MVI AJI Indonesia. Asesmen ini bersifat deskriptif dan eksploratif. Tujuannya memotret kondisi objektif media dan ekosistem pendukungnya, bukan menguji hipotesis atau membandingkan kinerja antar-media.

Kerangka MVI yang kami pakai berangkat dari beberapa model pemikiran *media viability* yang antara lain yang dikembangkan Deutsche Welle (DW) Akademie. Model DW memandang ketangguhan media sebagai hasil interaksi antara kapasitas internal organisasi media dan kondisi ekosistem di sekitarnya, mulai dari pasar, regulasi, teknologi, hingga khalayak. Kelompok kerja AJI mengadaptasi model tersebut ke konteks Indonesia, terutama untuk menangkap situasi media alternatif yang tumbuh di luar arus utama industri pers.

Laporan ini berisi hasil *pilot project* asesmen MVI tahun 2026. Karena itu, selain memotret kondisi media alternatif, asesmen juga menjadi uji coba dan prosedur MVI agar dapat disempurnakan dan dipakai lebih luas oleh siapa pun yang berkepentingan. Asesmen ini memakai metode campuran: data dikumpulkan secara kualitatif, lalu dikuantifikasi melalui skor numerik pada tahap analisis. Pilihan ini mengikuti logika model MVI DW, yang pada dasarnya kualitatif tetapi mengubah penilaian informan menjadi skor agar setiap indikator dapat dibaca dan dibandingkan. Asesmen dilakukan pada dua level sekaligus:

Pertama, level unit redaksi (studi kasus pada media alternatif tertentu). Kami mengamati langsung empat redaksi media alternatif dengan kondisi redaksi yang berbeda, mengumpulkan dokumen kinerja, mewawancarai pengelolanya. Tahap ini memotret kapasitas internal: tata kelola redaksi, keuangan, sumber daya manusia, dan teknologi. Kedua, level kawasan dan nasional. Kami mewawancarai pemangku kepentingan di luar redaksi di setiap kota lokasi media. Level ini menangkap kondisi ekosistem: regulasi, pasar dan pendanaan, infrastruktur digital, khalayak, serta perlindungan hukum. Penggabungan dua level ini penting karena viabilitas media alternatif tidak hanya ditentukan oleh apa yang terjadi di dalam ruang redaksi. Media yang dikelola dengan baik tetap rentan bila ekosistemnya tidak mendukung, dan sebaliknya.

Dari enam indikator keberlanjutan media alternatif, hasil asesmen di empat kota terpilih menunjukkan konten berkualitas meraih skor tertinggi rata-rata nasional 3,2. Angka ini masih tergolong dalam *semi-viable*, meski sedikit saja di bawah ambang *viable* (3,26-4,00). Bandung menjadi kota dengan nilai tertinggi di 3,5, disusul Kupang di 3,3. Hasil asesmen ini menegaskan bahwa sejak awal media alternatif memilih jurnalisme

berkualitas, memprioritaskan kepentingan publik sebagai fondasi pendirian, lalu merawatnya di sepanjang perjalanannya. Kesadaran tentang nilai-nilai demokrasi dan HAM tertanam di organisasi.

Hasil asesmen di empat kota di Indonesia menunjukkan indikator pelibatan publik meraih skor rata-rata nasional 3,0. Angka ini tergolong dalam kategori *semi-viable*, yang cakupannya merentang dari 2,51 hingga 3,25. Bandung menjadi kota dengan nilai tertinggi di 3,4, disusul Jakarta di 3,0. Hasil asesmen ini menegaskan bahwa pelibatan publik menjadi strategi utama media alternatif untuk bertahan. Media alternatif berupaya memperbesar dampak sekaligus membuka peluang-peluang pendanaan. Pelibatan publik bukan hanya berupa penyediaan wadah bagi mereka untuk berkomentar atas artikel tapi juga ajakan untuk terlibat secara langsung dalam pertemuan-pertemuan yang digelar rutin. Yang masih menjadi tantangan adalah pembakuan panduan di tingkat internal dan dukungan regulasi yang kuat di tingkat eksternal.

Secara umum, para pengelola media alternatif adalah jurnalis cum-aktivis. Mereka adalah individu-individu yang selama ini sudah mempunyai pengalaman ber jurnalisme dan beraktivisme. Jadi secara umum, para pengelolanya sudah mempunyai pengalaman dalam membangun dan menguatkan organisasi. Apakah para pengelola media sudah menyediakan perangkat organisasi yang memadai seperti menyediakan jaminan sosial untuk jurnalis, memenuhi hak ketenagakerjaan, skema perlindungan jurnalis? Nilainnya adalah 2.7 atau *semi viable*. Jakarta, Bandung dan Kupang mempunyai nilai *semi-viable*, hanya Makassar yang mendapatkan nilai *less viable*.

Dari seluruh hasil asesmen, keberlanjutan finansial mendapatkan penilaian *less viable,* penilaian ini juga merupakan nilai terendah dari semua indikator dalam asesmen ini, yaitu 2.4 dengan rincian penilaian Jakarta (2.1/*less viable*), Bandung (2.8/*semi viable*), Makassar (2.0/*less viable*) dan Kupang (2.6/*semi viable*). Hasil ini juga menunjukkan bahwa keberlanjutan finansial merupakan persoalan serius yang harus diatasi media alternatif. Masalah finansial utama pada media alternatif yaitu masih mencarinya model bisnis yang stabil, tidak adanya ceruk dana yang umumnya sudah diisi oleh media mainstream yang menyebabkan ketergantungan pada pendanaan yang sangat terbatas. Hal ini tampak dalam sulitnya menarik sponsor/iklan, dana yang masih mengandalkan hibah/grant dan minimnya variasi sumber dana.

Dalam hal adaptasi teknologi, media alternatif di Indonesia berada pada skor agregat nasional sebesar 2,6, pada kategori *semi-viable*. Angka ini berada di ambang bawah rentang kelayakan (2,51-3,25), hanya sedikit di atas kriteria *less viable*. Skor ini menggambarkan situasi transisi yang rentan. Bisa dikatakan, sebagian besar ruang redaksi alternatif telah mengadopsi perangkat digital dasar untuk memproduksi dan mendistribusikan konten, namun belum memiliki kedaulatan infrastruktur teknologi yang kokoh untuk menjamin keberlanjutan dan independensi jangka panjang. Kondisi *semi-viable* ini juga menyisakan kerentanan struktural terhadap keamanan digital dan independensi informasi. Tanpa infrastruktur komputasi mandiri dan sistem pertahanan siber yang terlatih, media alternatif rentan mengalami sensor digital, peretasan, hingga penutupan sepihak (*deplatforming*) saat mengangkat isu-isu publik yang bersinggungan dengan kepentingan politik dan ekonomi mapan. Akses teknologi yang belum

sepenuhnya berdaulat membuat posisi tawar media relatif lemah ketika menghadapi represi digital.

Secara keseluruhan, angka 2,6 menjadi alarm bahwa adaptasi teknologi media alternatif di tingkat nasional belum bergerak ke arah resiliensi sejati. Tanpa adanya strategi penguatan kapasitas infrastruktur, media alternatif berisiko terus berada di tepi jurang *less viable*.

Indikator pengakuan, perlindungan hukum dan keterbukaan informasi memperoleh skor nasional 2,4, dalam kategori *less viable*. Artinya, media alternatif masih menghadapi tantangan untuk memperoleh pengakuan formal, perlindungan hukum, menjalankan kebebasan berekspresi serta akses informasi publik. Kondisi ini salah satunya tercermin dari proses verifikasi di Dewan Pers. Tidak semua media alternatif memiliki kapasitas memenuhi persyaratan verifikasi. Verifikasi di Dewan Pers meliputi, verifikasi administrasi antara lain tentang aspek badan hukum, struktur organisasi, ketenagakerjaan, konten dan verifikasi faktual.

Berdasarkan temuan dan analisis dari kerja asessmen ini, maka ada beberapa rekomendasi yang perlu dilakukan oleh para pihak terkait sebagai berikut:

Pertama, pengelola media alternatif agar terus mempertahankan kualitas konten sebagai pilar yang membangun kepercayaan publik, antara lain melalui penguatan kerja jurnalisme yang kolaboratif, dan gerakan aktivisme/advokasi kasus pasca publikasi berita.

Kedua, dua kondisi yang masih buruk, yaitu perlindungan hukum dan keberlanjutan dari sisi finansial harus mendapat perhatian serius dari para pihak di luar media alternatif. Pemerintah melalui Dewan Pers harus mengupayakan verifikasi dan legalitas media alternatif agar setara dan aman dengan media arus utama ketika menjalankan tugas jurnalistik. Keberadaan dana abadi untuk jurnalisme *(trusted fund/endowment fund for journalism)* mendesak, dalam upaya mengurangi ketergantungan pembiayaan media alternatif dari donor internasional, perusahaan komersial dan dana hibah pemerintah yang memiliki resiko politik. Keberlanjutan finansial juga harus dijamin melalui pendampingan ketrampilan manajemen keuangan, pengembangan model bisnis yang khas bagi media alternatif dan membangun jejaring internasional.

Ketiga, model partisipasi publik yang cukup baik harus terus dikembangkan lewat sistem komunitas pembaca/pelanggan, *peer-journalist*, dan sebagainya. Adaptasi teknologi masih relatif rendah dan tidak merata antar media alternatif, terutama dalam memitigasi seragan digital. Oleh karenanya diperlukan intervensi pelatihan dan instalasi teknologi digital.

Asesmen ini memiliki kelemahan utama keterbatasan objek studi pada media alternatif dan media yang berlokasi di empat kawasan tertentu sebagai pilot projek. Ke depan dan agar potret situasi keberlanjutan media lebih holistik, perlu asessmen yang menjangkau data media alternatif atau media arus utama lebih meluas ke seluruh Indonesia.

BAB I
PENDAHULUAN

BAB I
PENDAHULUAN

Kondisi Umum Media Jurnalisme

Indonesia termasuk negara dengan kategori transisi demokrasi, atau *flaw democracy*, suatu kondisi yang masih kabur antara sistem politik yang otoriter dengan demokrasi yang masih berjalan secara prosedural. Dalam suasana politik ini, sektor media dan jurnalisme terdampak langsung, baik dalam bisnis informasi maupun kerja produksi berita sebagai layanan publik. Dalam sistem politik demokratis, media massa memiliki fungsi sosial sebagai ruang publik mendiskusikan berbagai isu kepublikan. Fungsi ini diwujudkan melalui berita yang berkualitas dan kolom komentar publik yang terbuka dan setara. Produk utama media adalah berita dan peran kunci dari berita adalah melakukan kontrol terhadap kekuasaan agar tidak terjadi penyimpangan. Peran ini hanya bisa dimainkan oleh media yang modal produksinya berasal dari kemitraan dengan pihak yang peduli kepada berita dan jurnalisme sebagai investasi pengetahuan.

Masalahnya, ada atensi yang rendah terhadap media jurnalisme dan literasi berita yang juga rendah di publik, dipicu COVID-19 dan disrupsi digital, terjadi krisis pendapatan keuangan media arus utama yang berdampak pada krisis produksi berita. Krisis terjadi pada jantungnya: biaya produksi dan diseminasi berita. Akibat efisiensi, produk jurnalistik berkualitas yang berbiaya tinggi mengalami pengurangan bahkan tersingkir. Upaya pemerintah untuk memberi subsidi terhadap media berita masih terbatas dan memiliki resiko politik. Memperhatikan kondisi ini, potret media dan jurnalisme berkualitas sedang tidak sehat atau tangguh.

Media berita secara global tercatat sebagai sektor yang mengalami krisis terus menerus baik oleh bencana ekologis, kesehatan maupun krisis politik lokal (Scott, Bunce, Wrigt, 2019). Prakarsa menyelamatkan media dari krisis berkepajangan misalnya antara lain tersimpul dalam dokumen bernama: media viability index (MVI), yang diterbitkan Deutsche Welle (DW) di Jerman pada tahun 2020. MVI ini didukung oleh UNESCO dan diharapkan menjadi indikator mengukur keberlangsungan media secara umum, dan jurnalisme secara khusus sebagai entitas bisnis dan sosial. Keberlangsungan (secara bisnis) dan reputasi (institusi) media di publik menjadi nilai utama. Kedua nilai ini saling berpengaruh dan menentukan masa depan media.

Di Indonesia sejak dua dekade terakhir, muncul dua arus kerja jurnalisme. Arus pertama diwakili oleh majalah dan koran Tempo yang mengandalkan iklan dan kemitraan komersial sebagai pilar pendanaan. Grup Tempo juga memproduksi berita rutin sebagai penyeimbang layanan jurnalisme investigasi, menggelar kegiatan penunjang seperti pelatihan dan layanan database dan *podcast* untuk memperkuat pendanaan. Tempo mewakili model korporasi komersial yang memiliki jangkauan pembaca meluas, memiliki reputasi panjang sebagai media berita dan dikelola jurnalis profesional. Arus kedua diwakili pegiat media alternatif berbasis digital seirama dengan tumbuhnya pengguna media internet dan sosial media di Indonesia. Mereka antara lain dimotori Watchdoc sebagai perusahaan mikro penyedia video investigasi. Disusul kemudian oleh Konde.co, Jaring.id, the Conversation dan Multatuli Project. Mereka mewakili model non-pforit, dikelola para jurnalis-cum aktifis dan terhubung dengan lembaga internasional.

Setelah UU Pers berusia lebih dari 25 tahun, belum ada perubahan pada struktur kepemilikan dan isi media arus utama. Memasuki era berita digital, pemberitaan yang diwarnai polarisasi politik kebijakan, disinformasi dan pemberitaan informasi yang insinuatif masih tinggi. Salah satu problem besar yang terancam dari situasi ini adalah krisis informasi berkualitas, jurnalisme pemberi pencerahan, advokasi kebijakan dan kontrol kekuasaan koruptif. Krisis jurnalisme berkualitas dipicu oleh krisis korporasi media arus utama yang sebelumnya selama puluhan tahun rutin menyuguhkan berita mendalam dan kritis. Misalnya krisis keuangan yang dihadapi majalah Tempo, koran Tempo, Jakarta Post Krisis ini dilipatgandakan dengan krisis menyangkut keamanan pekerja pers dari ancaman inveksi virus COVID-19. Dalam riset Masduki yang disponsori UNESCO dan Public Media Alliance (2021) yang berbasis di London, bahwa lebih dari 70 % korporasi media mengalami krisis, 40% lebih mengurangi jumlah karyawan, gaji bulanan, dll. Protokol kesehatan *social distancing* memberatkan

Terdapat kondisi struktural bahwa berita sepenuhnya menjadi produk komersial, bergeser dari fungsi sebagai *public good* menjadi *commercial good* bahkan *political good.* Sejumlah jurnalis idealis tidak nyaman atas situasi ini, memilih keluar untuk bekerja secara independen, yang kemudian menjadi motor media berita alternatif. Terdapat konflik kepentingan dalam ruang redaksi media: politik, ekonomi dan publik. Media arus utama komersial akan selalu meyakini bahwa intervensi politik dan ekonomi dari pemiliknya sebagai hal yang wajar. Adapun redaksi media alternatif akan selalu memisahkan antara kepentingan redaksi (publik) dengan aspirasi politik jurnalis atau pengelola redaksi lainnya. Dalam sejarah politik kontemporer Indonesia, pernah terjadi keberpihakan Jakarta Post secara terbuka ke Joko Widodo (2014) dan dukungan terbuka Washington Post kepada calon Presiden Barrack Obama.

Dokumen ini melaporkan hasil assemen atas media alternatif, yang –secara historis— adalah upaya merawat sejarah panjang pers perlawanan dan pers perjuangan di Indonesia. Ini sejalan merawat prinsip universal pluralisme media (adanya media komersial, media alternatif, dll.) yang diperlakukan secara setara. Pasca Orde Baru

runtuh tahun 1998, patut diakui di Indonesia terjadi hegemoni komersialisme dalam struktur media. Media komersial mendominasi ruang publik, disertai aksi politisi ruang redaksi yang menggerus kualitas berita. Riset PR2Media (2024) terkait kepemilikan dan afiliasi politik media di Indonesia menggambarkan dengan mendalam situasi ini disertai rekomendasi kebijakan yang diperlukan ke depan. Jika Indonesia ingin menjaga demokrasi khususnya media dan jurnalisme yang sehat, maka reformasi kebijakan diperlukan, dengan pendekatan afirkasi, pengakuan kembali media alternatif.

Lebih jauh, riset 2021 terkait kekerasan yang dialami jurnalis dan media alternatif di Indonesia menemukan relasi yang kuat antara media alternatif dengan gerakan aktivisme di ruang digital. Tiga kasus: peliputan peristiwa tambang Wadas, Purworejo Jawa Tengah oleh jurnalis di Yogyakarta, kekerasan digital yang diikuti perlawanan dalam kasus Project Multatuli dan peretasan akun media sosial Sasmito Madrim, menjadi contoh menarik fenomena aktivisme digital yang terhubung dengan gerakan kebebasan pers lewat media alternatif. Ada medan yang saling terkait dan selaras: kekerasan atas jurnalistik dan media jurnalistik alternatif yang memakai ranah digital: seperti *hacking, bulliying* akan disusul aksi perlawanan atas kekerasan itu sendiri dalam pola pikir digital: mobilisasi warga digital dengan karakteristik yang meluas, metode re-share, poster digital, republikasi, memakai media digital dan cara cara kerja aktivisme lintas sektor yang dilakukan warga urban dimana media digital menjadi wadah yang fleksibel.

Media Alternatif Sebagai Fokus

Hasil asesmen menunjukkan keyakinan bahwa jurnalisme tidak akan mati. Kematian hanya terjadi pada platform-nya. Regenerasi jurnalisme justru terjadi ketika disrupsi digital dengan aktor dan ekosistem yang baru. Faktor yang memengaruhi merupakan determinasi teknologi digital. Dalam kerangka pikir ini, muncul jurnalisme konvensional dan digital. Nah, jurnalisme digital yang kini semakin menggeser jurnalisme konvensional telah melahirkan puluhan media alternatif digital baru yang merujuk Fuch (2010) sebagai tipe redaksi kecil *(small newsroom)* dengan genre jurnalisme yang mengadvokasi publik. Jurnalisme digital dalam pengertian di sini adalah aktifitas produksi dan diseminasi informasi jurnalisme, yang menggunakan platform berbasis internet, baik berupa website maupun platform media sosial. Internet membantu jurnalis mampu membuat berita secara cepat, menjalin perencanaan dan evaluasi berita secara partisipatif. Lebih penting lagi, internet membuat informasi jurnalisme menjadi efisien dalam produksi dan distribusi. Survei Katadata (2021) menyebutkan pengguna intenet di Indonesia mencapai 196,7 juta, atau hampir 70% penduduk. Penetrasi internet mencapai 72% kawasan Indonesia. Mereka adalah konsumen aktual dan potensial dari bisnis jurnalisme digital di Indonesia.

Secara umum, model bisnis (istilah ini tidak harus identik dengan usaha komersial) jurnalisme apapun selaras dengan model bisnis layanan pada umumnya. Antara lain dari sektor pendanaan dapat dibagi menjadi dua: Pertama, bersifat profit atau melekat sebagai usaha media dengan berita sebagai produk komoditas yang dijual kepada pembaca/pemirsa selaku konsumen. Model klasik ini masih bertahan hingga

sekarang. Di Indonesia misalnya, model ini diterapkan koran Indonesia Raya tahun 1950an dan Majalah Tempo.

Kedua, model bisnis non-profit yang jika merujuk Lugo dan Aleman (2014) tumbuh subur di Amerika Latin. Mendasarkan studi pada fenomena intervensi berbagai lembaga donor internasional terhadap praktek jurnalistik di Amerika Latin, kedua penulis melihat fenomena yang diklasifikasi sebagai *'non-profit investigative journalism agency*' dari beberapa aspek: bagaimana proses pendiriannya, bagaimana media media ini memperoleh pendanaan publik, bagaimana proses kerja jurnalistik dan editorial di redaksi sebagai model baru dalam produksi berita mendalam. Peluang keberlanjutan media ini tergantung inisiatif menyajikan produk jurnalisme berkualitas sebagai pilar demokrasi sebuah negara.

Intinya, media alternatif yang bercirikan partisipasi publik perlu steril dari pendanaan eksternal non-publik di satu sisi, dan perlu dukungan perlindungan hukum holistic (pendataan, pendanaan, dll.) terutama karena perannya menyediakan informasi publik. Media berita secara umum mengelola kerja jurnalistik termasuk berita investigasi yang kini identik dengan media alternatif. Jurnalis selalu bertugas mengumpulkan, menulis, mengedit, dan menerbitkan berita, atau melakukan penelusuran panjang terhadap sebuah kasus yang memiliki kejanggalan politik. Selain itu, investigasi merupakan penelusuran kasus yang kerap dirahasiakan, enyangkut reputasi dan perilaku politik ekonomi pejabat publik di sebuah negara. Investigasi oleh media alternatif adalah kerja berbiaya tinggi, waktunya panjang dan beresiko, tak hanya melibatkan jurnalis, tetapi sumber berita whistleblower, aparat keamanan serta para korban (Wiesand, 2016).

Peneliti sepakat dengan pandangan Karasova (2023) bahwa media alternatif secara ekonomi politik berbeda dengan media arus utama. Media alternatif memiliki orientasi layanan komunitas publik yang kuat, tanpa pamrih dan keberadaannya terhubung dengan gerakan kritis di masyarakat sipil sektor demokrasi komunikasi. Media alternatif bersifat radikal dalam penyediaan konten, ada model partisipasi yang melibatkan korban sebagai subjek, model pengambilan keputusan redaksi yang lebih setara, egaliter, berperspektif gender. Media alternatif berpola kritik atau *critical media organization*, yang mencakup praktek *citizen journalism, grassroot media and alternative content distribution.* Sementara itu, redaksi media arus utama cenderung elitis, birokratis, berorientasi kepada propaganda pemasaran komersial.

Tabel berikut ini merangkum beberapa kelebihan dan kekurangan sebagai tantangan media alternatif di Indonesia dibandingkan media arus utama.

Tabel Infografis 1
Kondisi Media Arus Utama dan Media Alternatif



(Diolah dari berbagai sumber oleh tim penulis)

Tabel di atas menunjukkan bahwa secara umum media alternatif memiliki urgensi dan hak serta peluang perlindungan hukum yang sama dengan media jurnalisme arus utama. Tabel menunjukkan terjadinya diskriminasi hukum, ketiadaan hukum yang menerjemahkan amanat konstitusi UUD 1945 terkait kebebasan berpendapat. Berbagai kondisi struktural di atas menjadi latarbelakang tim peneliti/assessor untuk melakukan uji coba/pilot asesmen *media viability* dengan media jurnalisme alternatif sebagai fokus utama.

Urgensi dan Indikator *Media Viability*

Gagasan media viability dan atau sustainability melingkupi banyak aspek, mencakup pendanaan dan jaminan persaingan bisnis yang sehat, integrasi model bisnis media digital vertikal dan horizontal, konsolidasi segmen baru di pasar media, yaitu penyedia dan distributor layanan media digital, termasuk video on

demand, serta produksi konten, yang didorong oleh kelompok produksi swasta dan anak perusahaannya, serta lembaga penyiaran publik.

Mengapa pengetahuan media viability penting? Memiliki pemahaman yang mendalam tentang situasi kelayakan media di suatu negara penting karena dua alasan. Pertama, dari sisi praktisi media: jika newsroom media menyadari kondisi terperinci dan kekurangan yang ada dalam lingkungan beroperasinya media, upaya bertindak sesuai dan menemukan cara memperkuat keberlanjutan jurnalisme terutama merespons disrupsi digital yang sangat kompleks. Kedua. dari sisi aktivis media dan pembuat kebijakan media sangat penting untuk memiliki informasi menyeluruh tentang situasi media viability di suatu negara atau wilayah untuk mengembangkan strategi kebijakan makro dan intervensi bantuan yang tepat.

Pengertian media viability dalam banyak literatur akademik dan definisi yang dirumuskan Lembaga konsultan media profesional, misalnya dari Deutsche Welle Akademie dan Free Press Unlimited secara umum mengacu kepada dua aspek. Pertama, aspek ekonomi dalam operasional media berita, yang merespon situasi krisis pasca disrupsi digital dan COVID-19. Kedua, aspek budaya kerja yang menggabungkan dimensi ekonomi, standar profesi, perlindungan hukum, keamanan kerja jurnalis, dll. Jika aspek pertama bersifat kelembagaan atau korporasi media, maka aspek kedua melingkupi individu. Istilah viable, dalam bahasa Indonesia kita belum cukup popular, dan untuk kajian ini kita sebut saja: ketangguhan atau resiliensi. Ketangguhan media jika mengacu pada Global Media for Development dan Global Media Investment Fund adalah suatu kondisi ketersediaan penuh (*resourcefull*) sumberdaya operasi yang memungkinkan independensi editorial dan peran kritis media untuk melayani publik.

Lembaga independen BBC Media Action mendefinisikan media viability sebagai -pada awalnya- adalah keberlanjutan sumber daya keuangan yang memungkinkan media menjaga integritas di publik, antara lain memproduksi konten berkualitas yang sesuai kebutuhan publik. Namun, kriteria yang berfokus ke aspek ekonomi sebagai factor determinan ini diperluas ke tiga dimensi: politik ekonomi dan sosial yang menjadi faktor utama perubnahan ekosistem media pasca disrupsi digital di negara-negara dengan karegori rusak (*fragile countries*).

Jika kita merujuk dokumen konsultasi media viability di Tunisia, lembaga konsultan Alkhatt dan Global Forum for Media Development menggabungkan diksi yang sedang popular, yaitu media viability dan sustainability dalam makna yang beririsan. Merujuk laporan ini, maka ada konklusi umum bahwa media berita pada awalnya dapat viable jika didanai oleh pemerintah dan individu pengusaha lewat perusahaan atau yayasan yang ia bentuk. Masalahnya kedua entitas sumber dana tersebut saat ini bermasalah secara politik, terutama potensi campur tangan yang kuat ke redaksi melalui pendanaan. Media viabilitas kemudian bermakna berlakunya standar profesi jurnalis yang baik, jaminan independensi dan keberagaman konten serta struktur redaksi. Dalam hal ini, keberagaman sumber dana (tidak hanya bersumber tunggal) menjadi kunci untuk membangun jejaring media lebih luas sekaligus membentuk trust.

Secara umum, indikator viabilitas media memandang kelayakan media melampaui isu ekonomi dan manajemen bisnis media. Para penggagas media viability melihat secara lebih holistik area yang memengaruhi fungsi dan kualitas media berita, seperti konteks politik, hukum, dan ekonomi secara keseluruhan. Kelayakan,

keberlanjutan dan ketangguhan media didefinisikan sebagai "kemampuan media dan lanskap media untuk menghasilkan jurnalisme berkualitas tinggi secara berkelanjutan." Berangkat dari konteks ini, media viability berfokus pada empat aspek yang merupakan kajian lintas sektor: keberlanjutan finansial industri media berita; kemampuan organisasi berita untuk menghasilkan konten jurnalistik independen secara editorial; kualitas konten jurnalistik yang dihasilkan; dan kemampuan media berita untuk melayani kebutuhan dan mendapatkan kepercayaan dari warga negara selaku khalayak.

Secara rinci, indikator media viability (MVI) yang dirumuskan DW Akademie mengkaji lima dimensi yang memengaruhi fungsi dan kualitas media sebagai berikut:

Pertama, politik: mengkaji lingkungan politik di tingkat nasional dan lokal—dan bagaimana hal tersebut memengaruhi keragaman pandangan yang terwakili dalam konten berita, serta sejauh mana media berita dipengaruhi dan dikendalikan oleh pemerintah. Beberapa pertanyaan yang diajukan MVI adalah: Apakah negara memiliki peradilan independen yang menerapkan hukum dan putusan secara imparsial terhadap bisnis dan individu? Apakah hubungan antara pemerintah dan media berita profesional dan ditandai oleh rasa saling menghormati? Sejauh mana warga negara dan jurnalis memiliki akses terhadap informasi publik?

Kedua, ekonomi: berkaitan dengan aspek keuangan dan ekonomi pasar media, organisasi media berita, dan khalayak. Beberapa pertanyaan yang diajukan MVI adalah: Apakah media memiliki independensi editorial dari sumber pendapatannya? Sejauh mana persaingan mendorong—atau menghambat—kualitas jurnalisme? Seberapa besar permintaan khalayak terhadap konten berita berkualitas, dan apakah mereka bersedia membayarnya?

Ketiga, komunitas: mencakup kapasitas dan nilai-nilai khalayak, serta hubungannya dengan media, yaitu tingkat kepercayaan, keterikatan emosional, dan partisipasi. Beberapa pertanyaan yang diajukan oleh MVI adalah: Apakah pembaca atau warga negara umumnya mampu membedakan fakta dari fiksi? Dapatkah mereka memproduksi dan berkontribusi konten secara bertanggung jawab? Apakah organisasi media memiliki akses ke data khalayak (warga negara) yang andal, kebutuhan mereka, dan kebiasaan konsumsi mereka?

Keempat, teknologi: menilai akses media berita ke sumber daya dan teknologi untuk produksi dan distribusi dalam arsitektur digital, serta kemampuan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya tersebut. Beberapa pertanyaan yang diajukan oleh MVI adalah: Apakah warga negara di seluruh negeri memiliki kemampuan untuk mengakses konten dan membayarnya melalui sistem pembayaran digital yang terpercaya? Sejauh mana negara dan organisasi berita melindungi hak digital warga, terutama privasi mereka?

Kelima, konten dan kompetensi. Kriteria ini mencakup struktur kepemilikan, independensi para pelaku media, dan kualitas jurnalisme yang tersedia untuk publik. Beberapa pertanyaan yang diajukan oleh MVI adalah: Apakah jurnalis memiliki keterampilan yang diperlukan untuk menghasilkan laporan bersifat non-partisan berdasarkan sejumlah sumber yang berbeda? Apakah kepemilikan media sudah transparan atau apakah ia menghalangi keberagaman suara dan malah melayani kepentingan bisnis atau politik pemilik media?

Masing-masing dimensi di atas diukur dengan lima indikator kunci, sehingga menghasilkan total 25 indikator kelayakan media. Lantas, setiap indikator ditentukan oleh beberapa sub-indikator untuk menilai aspek konkret dari topik tertentu. Secara keseluruhan, ada 119 sub-indikator. Setiap sub-indikator MVI dinilai pada skala 4 poin - dengan skor 4 yang menunjukkan bahwa kondisi sepenuhnya mendukung kelayakan media berita dan skor 1 yang menunjukkan bahwa kondisi tersebut merupakan hambatan serius bagi kelayakan media Jika sub-indikator tidak relevan di negara tertentu, sub-indikator tersebut diberi skor 0 dan dihilangkan saat merata-ratakan sub-indikator menjadi skor akhir untuk setiap indikator. Skor indikator kunci dihitung dengan merata-ratakan skor untuk semua sub-indikatornya.

MVI membantu pengelola media, lembaga donor dan pelaku pengembangan media untuk mengidentifikasi secara lebih tepat jalur pengembangan kapasitas, bagi pemilik dan pengelola media menjadi database memperkuat kinerja media, dan peneliti akademis untuk memajukan literatur dalam isu ini. Selain itu, organisasi hak asasi manusia yang memantau kebebasan berekspresi di berbagai negara pasca otoritarian dapat menggunakan seluruh rangkaian indikator untuk menghasilkan laporan berkala, yang membantu meningkatkan analisa permasalahan yang ada dan potensi isu-isu krusial ke depa. Penerbit media yang mencari metode distribusi baru dapat menerapkan indikator yang menghubungkan digitalisasi dan kebiasaan publik untuk menilai apakah suatu produk berita dapat meningkatkan pasar.

Indeks media viability akan berkontribusi untuk membantu para pengambil kebijakan di sektor media di Indonesia dan lembaga internasional dalam memitigasi krisis jurnalisme publik sebagai pilar demokrasi media di Indonesia. Riset ini memberikan data awal berbasis pada indikator global terkait keberlanjutan media jurnalisme pasca pandemi COVID-19. Secara lebih luas, riset dilakukan karena studi serupa belum pernah dilakukan di Indonesia. Studi studi sebelumnya fokus kepada dampak COVID-19 terhadap kegiatan jurnalistik di lapangan, atau media massa secara umum sebagai entitas bisnis (Suprayitno, 2020; Parahita, dkk. 2020; Indah, 2020). Kajian akademik yang fokus kepada masa depan jurnalisme sebagai alat kontrol sosial belum mendapat perhatian yang tinggi. Demikian pula, riset yang memetakan berbagai inisiatif kerja jurnalisme investigasi diluar media arus utama juga masih terbatas.

Sepanjang lima tahun terakhir, isu keberlanjutan media *(media sustainability*) menjadi diskursus di kalangan pers dan pemerhati media global. Lembaga pemeringat keberlanjutan media yang berbasis di Washington, IREX misalnya setiap tahun mengeluarkan indeks global kesehatan media. Indikatornya sangat luas dari ekonomi korporasi, teknologi hingga jaminan kebebasan redaksional. Frere (2013) mendefinisikan keberlanjutan media sebagai daya tahan organisasi berita dan jurnalisme di suatu negara untuk bekerja efektif menjamin tersedianya jurnalisme berkualitas menghadapi tekanan struktur politik-ekonomi.

Di Indonesia, isu ini tampak terpusat pada tiga diskursus. *Pertama,* keberlanjutan media konvensional (cetak, radio dan televisi) sebagai entitas korporasi komersial pasca krisis popularitas menyusul revolusi teknologi digital. Teknologi internet telah mendisrupsi proses produksi dan distribusi berita menjadi lebih efisien dan cepat. Berita tidak lagi memerlukan birokrasi yang panjang untuk sampai ke publik. Model bisnis bergeser dari korporasi padat modal ke 'media rumahan'. Model bisnis agregasi berita oleh platform digital berskala global memicu krisis korporasi media

konvensional. Platform digital seperti Google mendominasi perolehan iklan sekaligus. Pola relasi media berita vs. platform digital tidak imbang karena kontrol algoritma sepenuhnya berada di tangan korporasi digital.

Kedua, terjadinya penurunan kualitas jurnalisme secara drastis pasca merebaknya situs berita daring yang hanya mengacu logika *click-bait*, tingginya disinformasi, hoax, dll. Berita sebagai produk informasi mengalami krisis kualitas dan sebagai resiko dari kualitas yang rendah, berita mengalami penurunan nilai kepublikan. Di sisi lain, platform digital dan portal berita online sejak kelahirannya menganut prinsip berita sebagai produk yang tersaji gratis, bukan berbayar (eceran atau berlangganan) seperti tradisi media cetak. Iklim ini menyulitkan media berita untuk menjaring pendanaan produksi dari publik.

Ketiga, pandemi COVID-19 ketika khalayak banyak di rumah memicu disrupsi pola kerja jurnalisme pasca kebijakan pembatasan mobilitas fisik warga. Pembatasan fisik membatasi akses kerja jurnalisme di satu sisi, dan mempercepat migrasi digital bisnis media di sisi lain. Muncul dua iklim yang saling bertolakbelakang. *Pertama,*dua tahun COVID-19 memicu pandemi bisnis media jurnalisme, yang ditandai oleh pemutusan hubungan kerja akibat melemahnya kinerja bisnis. UNESCO (2021) merilis 40% media pers mengalami krisis multidimensi yang berujung pada pemutusan hubungan kerja, pengurangan biaya produksi hingga penghentian produksi berita. Berbeda dari iklim pertama, disrupsi digital juga memicu transformasi bisnis media jurnalisme konvensional. Sejumlah media berita nasional melakukan migrasi layanan berita ke platform digital sejak produksi, distribusi hingga pemasaran.

Di luar media berita arus utama, berkembang pula inisiatif *start-up* media jurnalisme alternatif yang menawarkan/melanjutkan jurnalisme berbasis data dan jurnalisme investigasi. Project Multatuli, Konde.co, Magdalene.co, dll. misalnya, lahir dari jurnalis senior yang sebelumnya bekerja untuk jurnalisme media arus utama. Fenomena ini memberi optimisme tetap hidupnya jurnalisme setelah platform berita konvensional (cetak, internet dan siaran) semakin terpinggirkan. Jurnalisme di Indonesia tidak mati, mengalami evolusi bahkan revolusi format dan strategi diseminasi, dari platform lama ke platform baru.

Setelah melakukan kajian atas konsep dan implementasi *media viability* assessment di berbagai negara, dan memperhatikan kondisi empiris media dan jurnalisme di Indonesia, maka kelompok kerja memilih enam indikator *media viability* yang akan diukur sebagai berikut. Konten yang berkualitas; Pelibatan Publik; Penguatan Organisasi; Keberlanjutan Finansial; Adaptasi Teknologi: Pengakuan dan Perlindungan Hukum. Seluruh indikator yang diuraikan di sini sudah melingkuoi dua sisi: internal pengelola media alternatif dan eksternal (pemerintah, Dewan Pers, aktor strategis di lingkup media jurnalisme dan publik secara luas).

Pertama, **konten yang berkualitas**

Bentuk konten berita berkualitas bisa berupa: teks, foto, infografis, video, dan audio. Adapun indikator konten berkualitas terdiri dari/merpuakan hasil reportase yang independent: lebih melihat aspek kualitatif, bukan kuantitatif; konten berorientasi untuk kepentingan publik; menyajikan informasi akurat tentang kelompok minoritas dan marjinal; berperspektif HAM; kritis terhadap kekuatan dominan; original (dengan

mencantumkan sumber informasi yang digunakan). Kondisi tersedianya konten berkualitas dipengaruhi oleh:

- Tingkat kebutuhan publik terhadap konten berkualitas
- Tingkat partisipasi publik untuk menjadi informan jurnalisme
- Keterbukaan informasi lembaga pemerintah
- Adanya budaya kolaborasi liputan jurnalistik

Kedua, **pelibatan Publik**

Kelompok kerja MVI AJI Indonesia mendefinisikan pelibatan/partisipasi publik ke dalam aspek-aspek sebagaimana berikut ini:

- Publik berkontribusi dalam pembuatan konten dan distribusi informasi
- Menyediakan wadah bagi tulisan-tulisan (konten) dari publik/audiens/komunitas
- Mengajak publik untuk membuat aktivasi bersama
- Publik dapat mengusulkan tema liputan: melalui rapat redaksi terbuka, baik online maupun offline, polling, survey
- Menyediakan platform bagi publik untuk memberikan tanggapan atas konten
- Melibatkan publik dalam mendorong perubahan kebijakan, baik melalui pelatihan/kampanye/advokasi
- Memberikan ruang kepada publik/audiens/komunitas untuk terlibat aktif menyebarluaskan ide/gagasan/narasi
- Media membentuk ruang komunitas yang mengikat bagi khalayak dan publik secara umum berdasarkan kepentingan yang sama

Ketiga, **penguatan organisasi**

Adapun konsepsi dan standar penguatan organisasi media alternatif terdiri dari:

- Media alternatif berbadan hukum (PT, CV, koperasi, yayasan)
- Memiliki tim manajerial dalam pengelolaan media, bukan individual
- Mempunyai visi dan misi yang humanis dan progresif
- Mempunyai program kerja yang dirumuskan secara periodik
- Membentuk struktur organisasi media yang memungkinkan redaksi untuk tetap bekerja secara independen dan otonom
- Memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki keahlian dalam bidang konten/keredaksian, public engagement, dan finansial
- Mendukung peningkatan kapasitas SDM dan organisasi
- Membangun budaya kerja dengan melibatkan aspirasi tim (membuat SOP kerja, aturan organisasi, hak dan kewajiban tim)
- Memberikan apresiasi kepada anggota tim atas capaian kerja
- Memperhatikan kesejahteraan tim, fasilitas kesehatan dan ketenagakerjaan

Keempat, **keberlanjutan finansial**

Tim mendefinisikan indikator keberlanjutan finansial media sebagai berikut:

- Keberadaan sumber dana yanfg bervariasi (semakin bervariasi semakin viable)
- Pengelolaan bersifat non-profit (minimal: BEP)
- Mampu mengelola keuangan secara transparan
- Kemampuan media mengakses pendanaan secara bervariasi
- Kemampuan media membuka peluang pendanaan dari audiens
- Memiliki sistem pengelolaan keuangan yang akuntabel untuk mencegah fraud

Kelima, **adaptasi teknologi**

Kelompok kerja mendefinisikan adaptasi teknologi sebagai aspek-aspek berikut ini:

- Kemampuan media untuk mengakses dan mengelola teknologi produksi dan distribusi berita yang relevan dengan kerja jurnalistik
- Kemampuan SDM media untuk mengoperasikan teknologi
- Kemampuan media untuk memitigasi dan menanggulangi serangan digital
- Kemampuan jurnalis dalam *digital security*

Keenam, **pengakuan dan perlindungan hukum**

Kelompok kerja mendefinisikan pengakuan dan perlindungan hukum sebagai:

- Mendapatkan kemudahan dalam verifikasi oleh dewan pers
- Mendapatkan pengakuan yang sama di level undang-undang terkait pers
- Jika terjadi sengketa atau kekerasan jurnalistik media alternatif memperoleh dukungan yang sama dari Dewan Pers
- Adanya regulasi yang kuat untuk melindungi kebebasan pers dan kebebasan ekspresi
- Adanya keringanan pajak untuk media dalam kondisi krisis
- Menganggap produk jurnalisme sebagai kebutuhan dasar publik
- Perlindungan hak cipta atas produk/karya jurnalisme
- Adanya perlakuan yang sama dalam kerja jurnalistik
- Adanya regulasi kepemilikan media yang terbuka dan beragam

BAB II
METODOLOGI ASESMEN

BAB II
METODOLOGI ASESMEN

Kerangka Pikir Asesmen

Riset ini merupakan kerja asesmen evaluatif atas ketangguhan *(viability)* media jurnalisme alternatif di Indonesia, dengan menggunakan rujukan pada *Media Viability Indicators* (MVI) yang telah dirumuskan kelompok kerja MVI AJI Indonesia. Asesmen ini bersifat deskriptif dan eksploratif. Tujuannya memotret kondisi objektif media dan ekosistem pendukungnya, bukan menguji hipotesis atau membandingkan kinerja antar-media.

Kerangka MVI yang kami pakai berangkat dari beberapa model pemikiran *media viability* yang antara lain yang dikembangkan Deutsche Welle (DW) Akademie. Model DW memandang ketangguhan media sebagai hasil interaksi antara kapasitas internal organisasi media dan kondisi ekosistem di sekitarnya, mulai dari pasar, regulasi, teknologi, hingga khalayak. Kelompok kerja AJI mengadaptasi model tersebut ke konteks Indonesia, terutama untuk menangkap situasi media alternatif yang tumbuh di luar arus utama industri pers.

Laporan ini berisi hasil *pilot project* asesmen MVI tahun 2026. Karena itu, selain memotret kondisi media alternatif, asesmen juga menjadi uji coba dan prosedur MVI agar dapat disempurnakan dan dipakai lebih luas oleh siapa pun yang berkepentingan.

Metode Pelaksanaan Asesmen

Asesmen ini memakai metode campuran: data dikumpulkan secara kualitatif, lalu dikuantifikasi melalui skor numerik pada tahap analisis. Pilihan ini mengikuti logika model MVI DW, yang pada dasarnya kualitatif tetapi mengubah penilaian informan menjadi skor agar setiap indikator dapat dibaca dan dibandingkan. Asesmen dilakukan pada dua level sekaligus:

1. Level unit redaksi (studi kasus pada media alternatif tertentu). Kami mengamati langsung empat redaksi media alternatif dengan kondisi redaksi yang berbeda, mengumpulkan dokumen kinerja, mewawancarai pengelolanya. Tahap ini memotret kapasitas internal: tata kelola redaksi, keuangan, sumber daya manusia, dan teknologi.
2. Level kawasan dan nasional. Kami mewawancarai pemangku kepentingan di luar redaksi di setiap kota lokasi media. Level ini menangkap kondisi ekosistem:

regulasi, pasar dan pendanaan, infrastruktur digital, khalayak, serta perlindungan hukum.

Penggabungan dua level ini penting karena viabilitas media alternatif tidak hanya ditentukan oleh apa yang terjadi di dalam ruang redaksi. Media yang dikelola dengan baik tetap rentan bila ekosistemnya tidak mendukung, dan sebaliknya. Sumber data asesmen berasal dari tiga kegiatan penggalian data di lapangan sebagai berikut:

1. Wawancara terstruktur dan/atau diskusi kelompok terfokus (FGD) dengan pemangku kepentingan, merujuk pada tabel indikator MVI.
2. Observasi langsung ke redaksi media terpilih untuk melihat kondisi empiris manajemen redaksi, termasuk observasi konten berita.
3. Dokumen, baik dokumen internal media (kinerja redaksi, keuangan, SDM) maupun laporan riset dan publikasi terdahulu yang relevan.

Adapun metode dalam pengumpulan data sekaligus pengukuran dalam assesmen ini mengacu kepada campuran antara kualitatif dan kuantitatif. Dalam hal pengumpulan data, maka dilakukan empat metode: survei, FGD, wawancara dan kajian dokumen. Secara umum, pertanyaan riset terkait *media viability* yang akan digali jawabannya di lapangan adalah:

1. Apa saja tantangan berkaitan dengan keberlangsungan media alternatif di Indonesia dalam lanskap digital dan sistem politik transisi menuju demokrasi oligarki?
2. Apa saja solusi dan rekomendasi yang bisa diterapkan untuk memitigasi dan menjamin keberlangsungan media alternatif?

Survei menyasar target keseluruhan populasi subjek, terdiri dari pengelola media alternatif, media mainstream dan media komunitas; akademisi komunikasi atau hukum; perwakilan pembaca media keseluruhan atau digital saja; influencer; kelompok rentan; asosiasi media/jurnalis; pemerintah daerah; perwakilan pengusaha; lembaga hukum; funding agencies, NGO, mahasiswa, komunitas, kementerian terkait, DPRD. Berkenaan responden survei dari internal media, maka mereka terdiri dari kelompok jurnalis (masing-masing 2 orang atau menjadi total 8 orang); pimpinan redaksi (1 alternatif, 1 mainstream); jurnalis/ reporter/editor (di luar media yang disurvei); Asosiasi jurnalis (AJI, PWI, IJTI, PFI); Asosiasi media (AMSI, ATVSI, PRSSNI, SPSI); kelompok audiens (masing-masing 2 orang jadi total 8 orang); Forum pembaca/subscriber; perwakilan dari kelompok rentan, kelompok minoritas dan marginal; Orang muda/remaja; komunitas tertentu misal seniman, sejarah, keagamaan.

Adapun studi dokumen, terdiri dari observasi dan telaah atas konten website media alternatif; website Dewan Pers, website lembaga pemerintah yang relevan; akun akun media sosial yang dikelola media alternatif; artikel yang terbit di buku atau jurnal ilmiah.

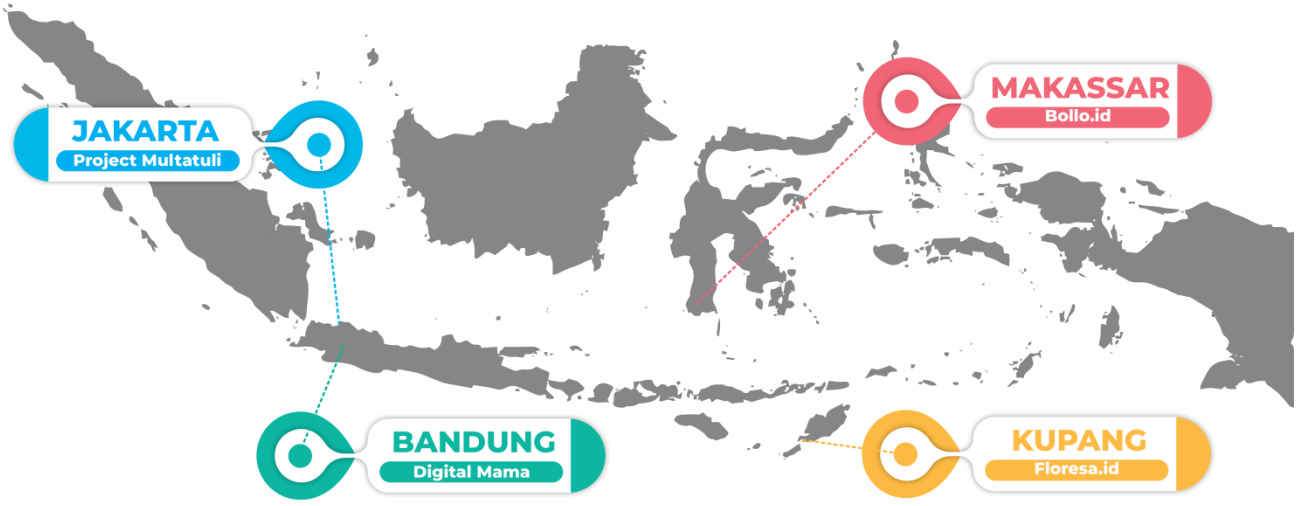
Diskusi kelompok terpumpun (FGD), berperan melengkapi dari survei, memperdalam hasil survei. FGD bertujuan secara khusus untuk menggali ide untuk memitigasi dan mengatasi problem keberlangsungan media. Dalam konteks *media*

viability, tim peneliti mentargetkan minimal ada dua kali FGD, di kawasan barat: Jakarta (Jawa) dan kawasan timur: Denpasar (luar Jawa dan kawasan Timur Indonesia). Peserta terdiri dari/berasal dari: pengelola media alternatif, media mainstream dan media komunitas, akademisi komunikasi atau hukum, perwakilan pembaca media keseluruhan atau digital saja, influencer, kelompok rentan, asosiasi media/jurnalis, pemerintah daerah, perwakilan pengusaha, lembaga bantuan hukum, Donor internasional, perwakilan aktivis mahasiswa, Kementerian/lembaga yang terkait, anggota DPRD.

Terkait lokasi, kelompok kerja MVI AJI Indonesia memilih media jurnalisme alternatif sebagai sasaran pilot dan menetapkan empat media di empat kota secara purposif. Pemilihan mempertimbangkan keragaman karakter kawasan (ibu kota, kota besar di Jawa, dan provinsi di luar Jawa) serta tipologi redaksi, dengan satu benang merah: keempatnya menjalankan jurnalisme mendalam atau investigatif yang berpihak pada kepentingan publik. Selengkapnya dapat dicermati pada tabel berikut ini:

Tabel Infografis 2
Media Alternatif Lokasi Asesmen

Media alternatif	Kota / provinsi	Karakteristik kawasan	Tipologi redaksi
Project Multatuli	Jakarta	Nasional, ibu kota negara	Jurnalisme investigatif dengan topik nasional yang beragam
Digital Mama	Bandung, Jawa Barat	Kota besar, urban, Jawa	Jurnalisme komunitas, mendalam, dan investigatif lokal
Floresa.id	Kupang, Nusa Tenggara Timur	Lokal provinsi, luar Jawa	Jurnalisme lokal dan investigatif
Bollo.id	Makassar, Sulawesi Selatan	Lokal provinsi, luar Jawa	Jurnalisme lokal dan investigatif



Keempat media ini tidak otomatis mewakili seluruh media alternatif di Indonesia. Mereka dipilih sebagai kasus yang memiliki informasi mendalam, agar temuan dapat menunjukkan pola tantangan dan daya tahan media alternatif di wilayah yang berbeda.

Informan

Skor dalam laporan ini berasal dari 47 informan pemangku kepentingan di empat kota: masing-masing 12 orang di Jakarta, Kupang, dan Makassar, serta 11 orang di Bandung. Panduan asesmen menetapkan target minimal 12 informan di setiap lokasi, dipilih secara purposif berdasarkan kompetensi dan kedekatan mereka dengan isu media di wilayah tersebut.

Informan mewakili lima kelompok: pengelola dan awak media alternatif; organisasi jurnalis dan asosiasi media; lembaga negara dan regulator; organisasi masyarakat sipil dan lembaga bantuan hukum; serta akademisi dan pembaca. Keragaman ini disengaja. Pengelola media paling memahami kondisi internal redaksi, sedangkan informan di luar media memberi penilaian yang lebih berjarak tentang ekosistem, misalnya regulasi, pendanaan, atau akses informasi publik. Identitas informan tidak ditampilkan per orang dalam laporan, temuan disajikan sebagai skor agregat dan kutipan tanpa atribusi personal kecuali atas persetujuan informan.

Instrumen

Instrumen MVI terdiri dari 6 indikator, 37 sub-indikator, dan 85 pertanyaan utama yang diskor. Setiap indikator memadukan faktor internal (kapasitas media itu sendiri) dan faktor eksternal (ekosistem yang melingkupinya), sehingga satu indikator dapat menunjukkan apakah hambatan terbesar ada di dalam atau di luar redaksi. Lihat tabel berikut ini:



Tabel 3
Indikator Asesmen Media Alternatif

Indikator	Sub-indikator	Pertanyaan	Cakupan
1. Konten berkualitas	8	18	Kepentingan publik, independensi, perspektif HAM dan demokrasi, kelompok rentan, originalitas dan verifikasi, kebutuhan publik, kolaborasi, pelatihan
2. Pelibatan publik	5	13	Platform partisipasi publik dalam konten dan pendanaan, kegiatan bersama komunitas, iklim kebebasan berkumpul dan berpendapat
3. Penguatan organisasi	3	9	Jaminan sosial dan perlindungan ketenagakerjaan, jaringan media, ketersediaan SDM berkualitas
4. Keberlanjutan finansial	6	13	Keragaman sumber dana, pengelolaan keuangan, dana eksternal, ekosistem iklan, regulasi, jaringan kolaborasi pendanaan
5. Adaptasi teknologi	7	14	Akses alat produksi dan platform, analitik data, keamanan digital, inovasi, literasi audiens, infrastruktur digital, keadilan algoritma platform
6. Pengakuan, perlindungan hukum, dan keterbukaan informasi	8	18	Status legal dan verifikasi Dewan Pers, perlindungan jurnalis, mekanisme sengketa pers, kebebasan berekspresi, informasi publik, kebijakan kebebasan digital

Setiap pertanyaan dinilai pada skala 1-4 dengan deskriptor yang tertulis dalam instrumen. Skor 4 berarti kondisi paling baik, skor 3 baik, skor 2 buruk, dan skor 1 paling buruk. Deskriptor ini membantu informan dan pewawancara memaknai setiap angka secara sama, misalnya untuk keberadaan badan hukum, dari "lengkap dan tertata" hingga "tidak ada".

Selain pertanyaan utama, instrumen memuat pertanyaan tambahan yang hanya diajukan dalam wawancara redaksi, misalnya pemahaman awak redaksi tentang independensi, audit keuangan, dana cadangan, dan titik impas. Jawaban atas pertanyaan tambahan ini memperkaya analisis studi kasus, tetapi tidak dimasukkan dalam perhitungan skor utama.

Tahapan Kerja Asesmen

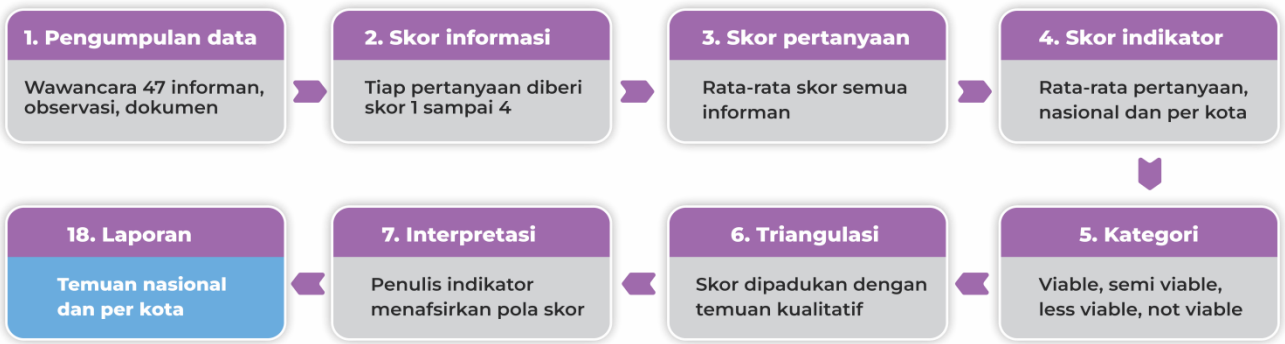
Ada beberapa tahapan pelaksanaan *assessment media viability* agar dapat berjalan efektif. Dalam kaitan dengan buku ini, pelaksana evaluasi/assessor harus membaca dengan cermat setiap tahapan. Adapun tahapan *assessment* MVI adalah:

1. Penetapan tujuan, target media/kawasan, luaran laporan.
2. Pembentukan tim (koordinator riset, tim enumerator/pewawancara/observer, dll) untuk pengumpulan dan analis data disertai penetapan tahapan kerja oleh tim.
3. Koordinasi awal penyamaan pemahaman soal metode MVI dan pembagian tugas.
4. Pengumpulan data (observasi, analisis isi, wawancara terstruktur/survei, dll.)
5. Analisis data lapangan secara kualitatif dan kuantitatif
6. Penyampaian laporan ke publik dan/atau pemilik otoritas kebijakan.

Beberapa sumber informasi/data statistik dan laporan riset untuk latarbelakang yang perlu tersedia dan dipelajari sebelum melakukan wawancara terstruktur, antara lain:

1. Buku tool of media viability assessment (AJI Indonesia, 2025)
2. Indeks kemerdekaan pers (Dewan Pers, 2025)
3. Indeks keterbukaan informasi publik (KIP, 2025)
4. Indeks demokrasi-kebebasan berinternet (Freedom House, 2025)
5. Peta arsitektural media massa di Indonesia terbaru: jumlah, jenis media, area isu media (nasional, lokal, komunitas), kepemilikan, lokasi kantor, *coverage audiens*/segmentasi layanan khalayak, posisi ideologis, bahasa berita, dll.

Asesmen berjalan dari persiapan, pengumpulan data, hingga analisis skor, seperti terlihat pada diagram di bawah. Pada tahap persiapan, kelompok kerja menetapkan sasaran dan media, membentuk tim (koordinator riset, penulis per indikator, serta enumerator dan pewawancara di setiap lokasi), lalu menyamakan pemahaman tentang konsep MVI dan deskriptor skor. Tim juga mempelajari data sekunder, antara lain Indeks Kemerdekaan Pers, Indeks Keterbukaan Informasi Publik, laporan Freedom House terkait kebebasan pers di Indonesia, laporan tahunan AJI terkait kondisi media dan jurnalisme, dan peta media di tiap wilayah.

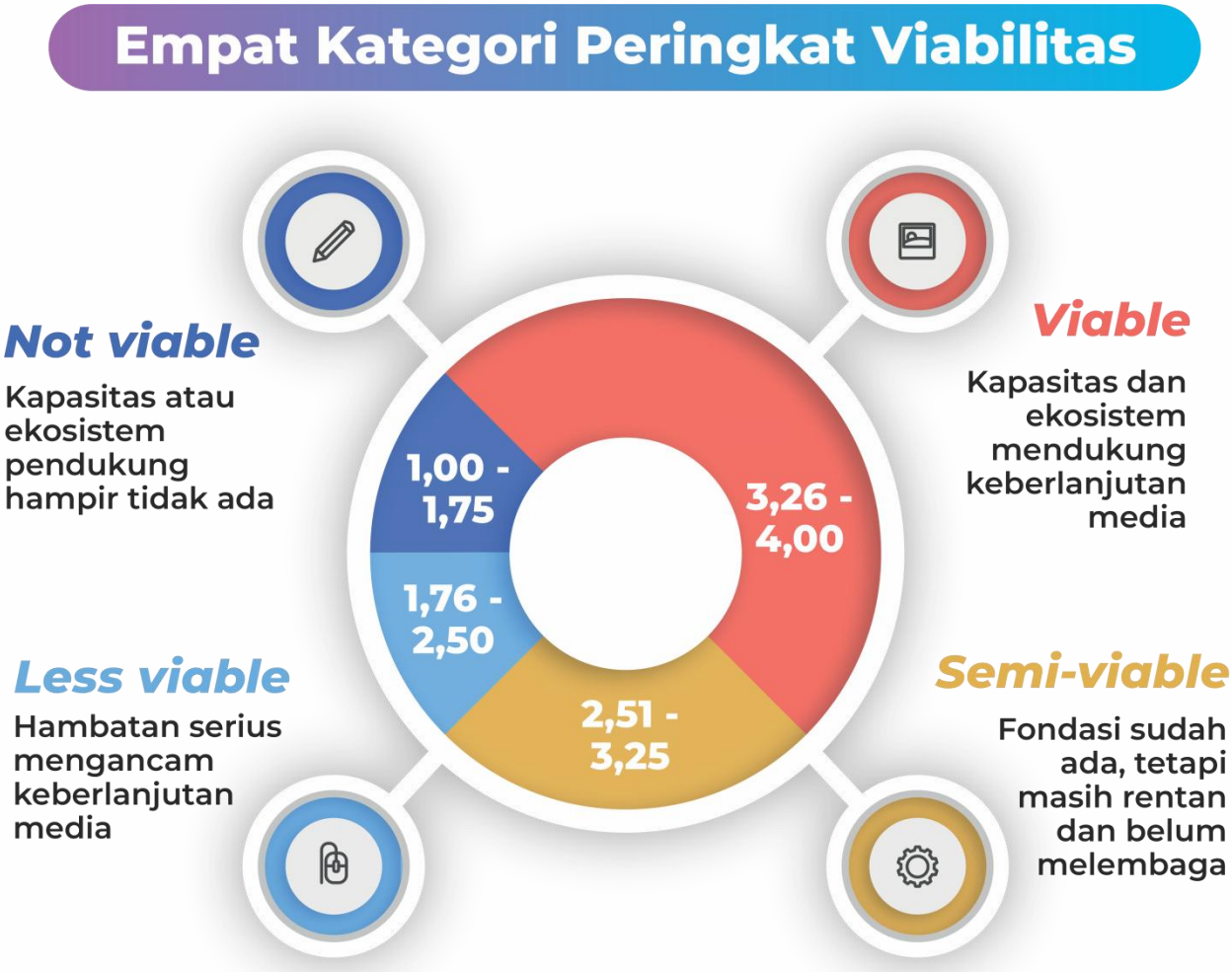


Gambar 1. Bagan alur tahapan pengambilan data hingga penyusunan laporan

Pengumpulan data lapangan meliputi observasi redaksi, dokumen kinerja, dan konten berita di keempat media, serta wawancara terstruktur dengan pemangku kepentingan di setiap kota. Pewawancara menjelaskan tujuan riset dan meminta izin merekam, lalu memastikan informan memahami arah skala: 4 untuk kondisi terbaik dan 1 terburuk. Instrumen difinalisasi pada akhir Mei 2026, dan rekapitulasi skor dirampungkan pada September 2026.

Skor dihitung dengan rata-rata sederhana tanpa pembobotan. Skor pertanyaan adalah rata-rata skor semua informan yang menjawabnya, dan jawaban kosong tidak dihitung sebagai nol. Skor indikator adalah rata-rata skor pertanyaan di dalamnya. Skor nasional mencakup 47 informan, sedangkan skor kota memakai rekap informan di masing-masing kota; angka di bab temuan mengacu pada kompilasi hasil asesmen tim penulis.

Infografis 4
Empat Kategori Peringkat Viabilitas



Angka tidak dibaca sendirian, setiap skor dipadukan dengan temuan wawancara, observasi, dokumen, dan data sekunder, lalu ditafsirkan oleh penulis tiap indikator.

Keterbatasan

Setiap informan menerima penjelasan tentang tujuan riset dan penggunaan data sebelum wawancara, dan perekaman suara maupun foto dilakukan atas izin mereka. Data per informan hanya dipakai tim untuk keperluan analisis. Sebagai uji coba, asesmen ini memiliki sejumlah keterbatasan yang perlu diingat saat membaca temuan:

1. Asesmen ini tidak menampilkan sampel representatif. Empat media dan 47 informan dipilih secara purposif. Skor menggambarkan kondisi media alternatif di empat lokasi ini, bukan seluruh media alternatif di Indonesia, apalagi industri media secara umum.

2. Skor adalah penilaian informan, bukan ukuran objektif seperti lazim dalam laporan keuangan teraudit. Triangulasi asessmen dengan teknis observasi dan pemeriksaan dokumen mengurangi bias ini, tetapi tidak menghapusnya.

3. Pengelola media yang diminta menilai redaksinya sendiri cenderung memberi skor lebih tinggi, sedangkan informan di luar media menilai aspek internal redaksi dengan informasi yang terbatas. Untuk itu, skor pertanyaan dan hasil temuan dari pertanyaan kepada pihak internal media perlu dibaca bersama temuan observasi.

4. Keterbatasan jumlah informan menjadi keterbatasan asesmen ini. Dengan 11-12 informan per kota, satu atau dua penilaian ekstrem dapat menggeser skor kota secara berarti. Perbandingan antar-kota sebaiknya dibaca sebagai indikasi, bukan peringkat.

5. Semua pertanyaan disampaikan kepada informan dan semua informan diperlakukan secara setara. Upaya ini untuk menjaga perhitungan tetap transparan, tetapi belum membedakan aspek yang lebih menentukan bagi keberlanjutan media.

6. Asesmen ini memotret kondisi pada satu waktu, yaitu tahun 2026. Perubahan dari waktu ke waktu baru dapat diukur bila asesmen diulang dengan instrumen yang sama.

Pengalaman pilot ini menjadi bahan penyempurnaan instrumen MVI. Panduan asesmen bersifat terbuka, sehingga dapat terus dimodifikasi dan dipakai oleh organisasi jurnalis, peneliti, maupun media sendiri untuk menilai ketangguhannya. Berikut ini panduan umum asessmen yang disiapkan oleh tim kelompok kerja untuk para assesor di lapangan:

Panduan Umum Asesmen

Pelaksanaan *assessment* (pemetaan evaluatif) terhadap ketangguhan media jurnalisme *(news media viability)* di Indonesia adalah suatu kegiatan riset pemetaan kondisi objektif yang bersifat deskriptif, eksploratif, mengevaluasi kondisi *eksisting* media tertentu atau suatu kawasan tertentu dalam lima hingga sepuluh tahun terakhir. *Assessment* dapat menjangkau dua level: satu unit/institusi media, dan/atau kondisi umum viabilitas media di suatu kawasan provinsi tertentu hingga nasional. Kedua level *assessment* ditentukan oleh kategori responden/informan, metode dan kualitas data yang berbeda berikut proses analisisnya.

Buku kecil ini menjelaskan panduan bagaimana melaksanakan riset pemetaan kondisi ketangguhan media di Indonesia -sebut saja MVI-, yang merujuk kepada indikator yang telah dirumuskan oleh kelompok kerja MVI AJI Indonesia. Buku ini terdiri dari tiga bagian. Pertama, penjelasan umum metodologi MVI. Kedua, panduan melakukan pengumpulan data lapangan terutama panduan melakukan wawancara bagi peneliti/assessor, pengelola media dan pihak terkait lainnya. Ketiga, penjelasan rinci dalam bentuk tabel berbagai indikator, sub indikator dan disertai tabel bagaimana melakukan penghitungan dan analisis data yang akan dipakai terutama untuk menjadi acuan dalam wawancara dan observasi ke redaksi media.

Intinya, buku ini menjelaskan langkah teknis peneliti/assessor memperoleh data lapangan agar akurat dan komprehensif. Buku panduan ini bersifat terbuka untuk publik dan dapat terus dimodifikasi, dipergunakan oleh siapapun yang berkepentingan.

Secara sederhana, langkah kerja metodologis *assessment* MVI untuk Indonesia termasuk pengumpulan data tersimpul dalam tabel di bawah ini:

Tabel 5
Metode Pengumpulan Data MVI

Tingkatan	Metode kuantitatif		Metode kualitatif		
media viability di tingkat/ kawasan (nasional atau provinsi)	Survei kepada para pihak terkait dengan merujuk kepada indikator dan sub-indikator MVI	Analisis isi konten berita beberapa media tertentu oleh tim peneliti dengan mengacu metode kuantitatif	Wawancara terstruktur dan/atau FGD kepada para pihak terkait di suatu kawasan tentang kondisi beberapa media terpillih	Observasi ke redaksi beberapa media terpilih untuk melihat kondisi empirik manajemen redaksi	Pengumpulan data baik berupa dokumen resmi kinerja redaksi, keuangan, SDM, dll pada beberapa media termasuk laporan riset dan publikasi terdahulu yang relevan
media viability di unit media tertentu (studi kasus)	Survei kepada pengelola media yang menjadi target	Analisis isi kepada satu konten media berita tertentu oleh tim peneliti mengacu metode kuantitatif	Wawancara mendalam dan/atau FGD kepada para pihak terkait di kawasan tentang kondisi suatu media tertentu	Observasi ke redaksi satu media tertentu untuk melihat kondisi empirik	Pengumpulan data baik berupa dokumen resmi kinerja redaksi, keuangan, SDM dll di satu media hingga laporan riset terdahulu yang relevan

Tabel di atas menjelaskan bahwa baik pada level kawasan maupun level media tertentu (studi kasus), metode yang dipergunakan bersifat campuran: kualitatif dan kuantitatif. Metode campuran ini dipilih agar pengumpulan data menjadi komprehentif.

Mengacu model dan langkah pengumpulan data MVI yang dikembangkan Deutsche Welle Akademie (DW), maka ada dua tahapan dan sumber data utama. *Pertama,* pengumpulan data dari dokumen yang relevan (studi indeksasi media terdahulu dan potret institusi media pada suatu kawasan). *Kedua*, wawancara mendalam dan/atau survei yang merujuk indikator-sub indikator MVI. Model DW ini metodologinya tunggal: kualitatif, namun pada tahapan analisis, assessor melakukan kuantifikasi data informan mengacu rumus *numeric scoring*.

Assessor perlu mempelajari instrumen wawancara dan pengukuran setiap dimensi dalam indikator MVI. Data awal berupa laporan publik terdahulu terkait indeks kemerdekaan pers, indeks demokrasi, indeks kebebasan berinternet dan laporan tahunan dari organisasi jurnalis seperti AJI, regulator independen seperti Dewan Pers, KPI dan KIP perlu tersedia . Dalam proses wawancara, perlu aspek teknis persiapan alat perekaman, pengkondisian situasi dan lokasi serta pencatatan jawaban. Bahan bahan pendukung melakukan wawancara, seperti profil pribadi informan dan -jika survei kuantitatif- profil responden mutlak dipelajari oleh assessor. Semua tahapan ini kita sebut sebagai latar belakang yang akan menentukan kualitas data.

Ketika melakukan wawancara, awali dengan penjelasan tentang program riset ini, minta izin melakukan perekaman suara atau foto, dan menjelaskan secara lugas apa yang dimaksud dengan MVI, bagaimana proses kerja asesmen dan hasil yang akan diharapkan. Pastikan bahwa informan/responden telah memahami secara sekilas MVI sehingga ketika memberikan jawaban tidak bias atau keluar dari konteks kebutuhan data. Ada baiknya memulai dari pertanyaan umum, lalu ke pertanyaan yang spesifik. Jangan memotong pernyataan informan/responden sebelum ia selesai menjawab sebab tugas utama kita hanya bertanya dan menyimak jawabannya, bukan melakukan diskusi. Jangan lupa merekam atau mencatat gaya bicara, posisi duduk atau situasi umum lokasi ketika wawancara dilakukan sebagai pendukung laporan.

Dalam tahap analisis, posisi skor 4 hingga 1 (lihat tabel), pastikan bahwa pemahaman responden/informan sama persis dengan kita, bahwa posisi 4 adalah kondisi terbaik sedangkan posisi 1 kondisi terburuk. Pastikan juga para informan sudah paham seluruh isi pertanyaan, dan memiliki kompetensi yang tepat sehingga ia tidak menyampaikan jawaban secara *common sense* atau asal menjawab. Perbedaan media lokal vs. media nasional, media konvensional vs. media siber harus jelas. Panduan pertanyaaan dalam buku ini posisinya sebagai pedoman bagi pewawancara, sehingga improvisasi dalam hal pertanyaan yang muncul secara spontan tetap diperbolehkan, sepanjang masih relevan dengan semua indikator MVI.

BAB III
TEMUAN UTAMA ASESMEN

BAB III
TEMUAN UTAMA ASESMEN



a. Konten Berkualitas

Dari enam indikator keberlanjutan media alternatif, hasil asesmen di empat kota di Indonesia menunjukkan konten berkualitas meraih skor tertinggi rata-rata nasional 3,2. Angka ini masih tergolong dalam *semi-viable*, meski sedikit saja di bawah ambang *viable* (3,26-4,00). Bandung menjadi kota dengan nilai tertinggi di 3,5, disusul Kupang di 3,3.

Hasil asesmen ini menegaskan bahwa sejak awal media-media alternatif memilih jurnalisme berkualitas yang memprioritaskan kepentingan publik sebagai fondasi pendirian, lalu merawatnya di sepanjang perjalanannya. Kesadaran tentang nilai-nilai demokrasi dan HAM tertanam di organisasi. Yang masih menjadi tantangan adalah pembakuan panduan di jenjang internal dan kebutuhan publik di jenjang eksternal.

Indikator konten berkualitas dalam riset ini mencakup sejumlah sub-indikator yang hasilnya terpetakan sebagai berikut:

Apakah media sudah secara konsisten memproduksi liputan yang memprioritaskan kepentingan publik?

Nilai rata-rata 3,64, tertinggi dibandingkan sub-indikator lain, menegaskan konsistensi media alternatif dalam memproduksi liputan yang memprioritaskan kepentingan publik. Pilhan sikap yang lalu diturunkan ke editorial ini melekat dalam identitas media alternatif.

Apakah media sudah memiliki panduan, SOP, atau aturan internal lainnya yang mencantumkan pemrioritasan kepentingan publik?

Meski sudah sikap kuat dalam memprioritaskan kepentingan publik lewat kerja jurnalisme bermutu, belum semua media alternatif menuliskannya dalam panduan, kesepakatan bersama, atau aturan internal organisasi. Fakta ini menjadi salah satu tantangan, tercermin dari nilai rata-rata 3,0. Perspektif yang jelas sebaiknya dituangkan dalam panduan tertulis yang dapat dijadikan rujukan dan diterapkan secara praktis di lapangan.

Apakah media secara konsisten menerapkan prinsip independensi dalam produk jurnalistiknya?

Prinsip independensi sangat lekat dengan kelahiran dan eksistensi media-media alternatif. Nilai rata-rata 3,64, sama tingginya dengan konsistensi memprioritaskan kepentingan publik, menegaskan kemantapan pilihan sekaligus pemahaman organisasi media alternatif terhadap nilai-nilai independensi.

Apakah media sudah memiliki panduan, SOP atau aturan internal lainnya yang memadai untuk mendukung penerapan prinsip independensi disertai mekanisme evaluasinya?

Nilai rata-rata 3,19 mengindikasikan bahwa pembuatan dan penerapan panduan, kesepakatan, atau aturan internal tertulis tentang independensi belum merata di antara media-media alternatif. Sudah ada media yang memilikinya, tapi tidak sedikit juga yang belum menuangkan prinsip-prinsip independensi yang mereka anut ke dalam dokumen tertulis.

Apakah media secara konsisten menerapkan perspektif HAM dan prinsip-prinsip demokrasi dalam manajemen redaksional?

Nilai rata-rata 3,43 menunjukkan keteguhan media dalam menerapkan perspektif HAM dan prinsip-prinsip demokrasi. Sekali lagi, ini menegaskan bahwa media alternatif sejak awal menjadikan perspektif dan prinsip ini sebagai bagian dari dinamika kerja organisasi.

Apakah media sudah memiliki panduan, SOP atau aturan internal lainnya yang memadai untuk mendukung penerapan perspektif HAM dan nilai-nilai demokrasi disertai mekanisme evaluasinya?

Seperti ditemukan dalam nilai yang lain, nilai rata-rata terkait keberadaan dokumen tertulis untuk penerapan perspektif HAM dan nilai-nilai demokrasi turun ke angka 3,04. Hal ini menandakan masih dibutuhkan kemauan dan kesepakatan bersama di dalam organisasi media alternatif untuk menurunkan nilai dan perspektif yang mereka anut ke dalam dokumen-dokumen tertulis.

Apakah media secara konsisten memproduksi karya jurnalistik yang memberikan prioritas bagi isu kelompok minoritas, rentan, dan marginal?

Salah satu kekhasan media alternatif adalah pilihan tegas untuk memberikan prioritas bagi kelompok minoritas, rentan, dan marginal. Pilihan ini yang membuatnya berbeda dibanding media arus utama yang seringkali memilih untuk memberitakan apa saja. Konsistensi media alternatif memproduksi karya jurnalistik yang memberikan prioritas bagi kelompok minoritas, rentan, marginal ini diakui para responden lewat nilai rata-rata 3,51.

Apakah media sudah memiliki panduan, SOP atau aturan internal lainnya yang memadai untuk mendukung pemrioritasan kelompok minoritas, rentan, dan marginal disertai mekanisme evaluasinya?

Sekali lagi responden memberikan nilai rata-rata yang lebih rendah terkait ketersediaan dokumen tertulis. Kali ini, untuk pemrioritasan kelompok minoritas, rentan, dan marginal, nilai rata-ratanya 3,02.

Apakah media secara konsisten memproduksi karya jurnalistik yang original, yang dikerjakan lewat disiplin verifikasi dengan pencantuman sumber-sumber secara transparan dan tepat?

Nilai rata-rata 3,57 mencerminkan kepercayaan responden pada konsistensi media alternatif memproduksi karya jurnalistik original yang dikerjakan lewat disiplin verifikasi. Nilai ini penting karena verifikasi merupakan fondasi utama kerja jurnalisme, dan media alternatif menjadikan itu sebagai yang utama.

Apakah media sudah memiliki panduan, SOP atau aturan internal lainnya yang memadai untuk mendukung komitmen pada originalitas karya disertai mekanisme evaluasinya?

Terkait keberadaan dokumen tertulis, baik panduan, SOP, maupun aturan internal lain, lagi-lagi nilai rata-rata turun, menjadi 3,09. Hal ini menandakan pentingnya segera dibuat kesepakatan internal untuk membakukan berbagai perspektif, nilai, dan disiplin yang selama ini sebenarnya sudah dihidupi dalam kerja organisasi.

Apakah publik masih memberikan prioritas untuk membaca konten berita yang berkualitas?

Nilai rata-rata 3,09 menunjukkan kebutuhan yang cukup tinggi di tengah publik untuk membaca konten berita yang bermutu. Ini kabar baik bagi media alternatif yang sejak awal memberikan prioritas bagi produksi konten berkualitas dan secara konsisten mengupayakannya. Kebutuhan publik yang cukup tinggi memungkinkan media alternatif untuk tetap eksis dan tumbuh dengan menyediakan layanan untuk mencukupi kebutuhan publik itu. Fakta ini sekaligus memberi peluang bagi media alternatif untuk terus berdampak dan menjadi relevan bagi dinamikan kehidupan warga.

Apakah literasi terhadap media dan jurnalistik dan akses terhadap konten berkualitas sudah merata?

Pemerataan literasi media dan akses terhadap konten berkualitas di Indonesia masih menjadi persoalan. Harus diakui, masih ada jurang antara Jawa dan luar Jawa, terlebih kawasan Indonesia timur. Nilai rata-rata 2,47 menggambarkan permasalahan tersebut.

Apakah publik mau memberikan dukungan, termasuk pendanaan, untuk mendukung keberlanjutan produksi berita berkualitas?

Idealnya, media alternatif bertahan dan tumbuh dengan mememperoleh dukungan dari pembaca, audiens, atau komunitasnya. Termasuk dalam dukungan tersebut adalah pendapatan berbasis audiens, mulai dari keanggotaan hingga langganan. Di Indonesia, praktik dan pengembangan potensi dukungan audiens ini masih sangat terbatas. Namun nilai rata-rata 2,87 dalam survei ini memberikan harapan bahwa sebenarnya ada keinginan dari publik untuk dapat mendukung media yang mereka percayai.

Apakah ada kebutuhan dari para pemangku kepentingan, mulai dari donor hingga organisasi media atau organisasi jurnalis, untuk melakukan kolaborasi jurnalistik?

Kolaborasi jurnalistik menjadi salah satu peluang untuk memperkuat penyebaran isu dan narasi. Dengan melibatkan banyak pihak, persoalan yang diangkan dalam liputan dapat menjangkau lebih jauh. Nilai rata-rata 3,32 menunjukkan adanya kebutuhan yang cukup kuat di antara para pemangku kepentingan untuk melakukan kolaborasi liputan.

Apakah sudah ada program-program kolaborasi liputan yang berjalan secara rutin?

Kolaborasi jurnalistik semakin banyak dilakukan di Indonesia dalam kurun 20-an tahun terakhir, terutama lewat program atau beasiswa. Penyelenggaranya bisa organasisasi media, organisasi jurnalis, atau organisasi media. Jangkauan kerja bersama bisa mencakup nasional atau juga regional. Nilai rata-rata 3,00 menunjukkan konsistensi yang cukup baik dalam penyelenggaraan kolaborasi.

Apakah program-program kolaborasi liputan ini berdampak signifikan bagi media, misal membuat publik semakin percaya atau membuat media memiliki alternatif sumber pendanaan?

Nilai rata-rata 3,19 menegaskan ada dampak yang cukup signifikan bagi media alternatif dari program-program kolaborasi liputan. Sebagai organisasi dengan sumber daya terbatas atau bahkan sangat kecil, media alternatif akan banyak tertolong oleh kerja-kerja bersama yang memproduksi konten jurnalisme bermutu. Kepercayaan publik akan tumbuh. Lebih dari itu, bagi tidak sedikit media, kolaborasi liputan menjadi peluang untuk memperoleh pendapatan tambahan yang penting untuk merawat keberlanjutan kerja-kerja mereka.

Apakah ada program kerja dari para pemangku kepentingan, mulai dari donor hingga organisasi media atau organisasi jurnalis, untuk melakukan program-program pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi jurnalis dan media?

Sama seperti kolaborasi jurnalistik, program pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi jurnalis dan media tumbuh setidaknya dalam 20 tahun terakhir. Organisasi media dan jurnalis menjadi salah satu motor utama. Juga beberapa organisasi pengembangan dan riset media. Nilai rata-rata 3,09 menunjukkan adanya keberlanjutan program ini meskipun tentu masih ada banyak hal yang bisa dikembangkan.

Apakah layanan program-program pelatihan dan peningkatan kapasitas ini sudah bervariasi (redaksi, keuangan, public engagement, inkubasi, dll.) dan merata bagi semua media dan jurnalis?

Nilai rata-rata 2,87 mengindikasikan belum terlalu variatifnya program-program pelatihan dan peningkatan kapasitas. Yang masih dominan tentu saja program-program terkait kerja keredaksian. Namun, yang dibutuhkan media alternatif untuk bertahan dan berkembang bukan melulu kapasitas para reporternya, tapi juga kemampuan mengelola komunitas, organisasi, dan juga bisnis.



b. Pelibatan publik

Hasil asesmen di empat kota di Indonesia menunjukkan indikator pelibatan publik meraih skor rata-rata nasional 3,0. Angka ini tergolong dalam kategori *semi-viable*, yang cakupannya merentang dari 2,51 hingga 3,25. Bandung menjadi kota dengan nilai tertinggi di 3,4, disusul Jakarta di 3,0.

Hasil asesmen ini menegaskan bahwa pelibatan publik menjadi strategi utama media alternatif untuk bertahan dan tumbuh. Lewat pilihan ini, media alternatif berupaya memperbesar dampak sekaligus membuka peluang-peluang pendanaan. Pelibatan publik bukan hanya berupa penyediaan wadah bagi mereka untuk berkomentar atas artikel tapi juga ajakan untuk terlibat secara langsung dalam pertemuan-pertemuan yang digelar rutin. Yang masih menjadi tantangan adalah pembakuan panduan di tingkat internal dan dukungan regulasi yang kuat di tingkat eksternal.

Indikator pelibatan publik dalam asesmen media viability ini mencakup sejumlah sub-indikator yang hasilnya terpetakan sebagai berikut:

Apakah media menyediakan platform untuk melibatkan publik (bisa di situs web, akun media sosial, dan atau grup percakapan)?

Pelibatan publik sejak awal menjadi salah satu strategi utama media alternatif untuk bertahan dan tumbuh. Meski memiliki banyak keterbatasan, penyediaan platform untuk pelibatan ini tetap diprioritaskan. Nilai rata-rata 3,43 mengindikasikan keseriusan media alternatif dalam merawat strategi ini.

Apakah media sudah memiliki petugas khusus untuk mengelola platform-platform pelibatan publik tersebut?

Salah satu tantangan terbesar media alternatif adalah keterbatasan sumber daya, termasuk anggota organisasi. Ditambah lagi, sebagian besar anggota umumnya berangkat dari latar belakang jurnalisme terutama reporter. Komposisi anggota ini sering menyulitkan upaya media alternatif untuk mengembangkan lini selain redaksi, termasuk kerja pelibatan publik. Menaruh satu orang khusus untuk mengelola platform

masih menjadi tantangan. Nilai rata-rata yang diberikan responden 3,02 mencerminkan ini.

Apakah media sudah memiliki panduan, SOP atau aturan internal lainnya untuk mengelola platform pelibatan publik tersebut disertai mekanisme evaluasinya?

Nilai rata-rata 2,81 menunjukkan bahwa pembuatan dokumen tertulis berupa panduan, SOP, atau aturan internal lain, masih menjadi tantangan bagi banyak media alternatif. Kesadaran membakukan perspektif dan nilai masih belum merata.

Apakah media menyediakan platform untuk melibatkan publik dalam proses pembuatan, pemuatan, dan pendistribusian konten baik daring (seperti pemuatan artikel, foto, dan video di situs web atau media sosial) maupun luring (seperti rapat redaksi terbuka)?

Hubungan media alternatif dan publik merupakan sebuah kekhasan tersendiri. Tidak jarang pilihan ini dimulai dengan cara-cara yang sebenarnya sudah lama diterapkan media, yakni menyediakan wadah bagi publik untuk terlibat dalam pembuatan dan distribusi konten. Di era internet, interaksi ini menjadi semakin terbuka. Nilai rata-rata 3,09 mengindikasikan keterbukaan semacam ini.

Apakah media sudah memiliki petugas khusus untuk mengelola platform-platform pelibatan publik tersebut?

Nilai 2,91 menunjukkan upaya serius media alternatif dalam menugaskan satu orang khusus untuk mengelola platform pelibatan publik ini. Tantangannya lagi-lagi terletak pada keterbatasan sumber daya manusia media kecil. Namun, karena terkait konten, keberadaan editor yang sudah barang tentu menjadi bagian integral organisasi media, niscaya dapat dijadikan solusi.

Apakah media sudah memiliki panduan, SOP atau internal lainnya untuk mengelola platform pelibatan publik disertai mekanisme evaluasinya?

Seperti umumnya kondisi terkait aturan tertulis, responden memberi nilai rata-rata cukup rendah yakni 2,74. Dibutuhkan kemauan dan kesepakatan organisasi untuk berdisiplin membakukan nilai dan perspektif yang selama ini mereka hidupi.

Apakah media sudah menyediakan platform bagi publik untuk berkontribusi dalam pendanaan seperti donasi, berlangganan, atau keanggotaan?

Pendapatan bersumber audiens merupakan pilihan ideal bagi media alternatif untuk bertahan dan berkembang. Namun, penyediaan platform untuk mengoptimalkan peluang pendapatan ini seringkali terbentur pada keterbatasan sumber daya. Akibatnya, teknologi yang digunakan untuk mengeksplorasi peluang ini juga terbatas. Nilai rata-rata 3,17 menggambarkan situasi dilematis ini.

Apakah media sudah memiliki petugas khusus untuk mengelola platform-platform pendanaan publik tersebut?

Mengoptimalkan sumber pendapatan berbasis audiens bukan perkara mudah. Ini bukan hanya perkara membuat wadah, tapi harus ada orang yang mengerjakan dan sistem

yang mendukungnya. Konsistensi kerja merawat peluang inilah yang menjadi tantangan besar bagi media kecil dengan sumber daya terbatas. Nilai rata-rata 2,89 mencerminkannya.

Apakah media sudah memiliki panduan, SOP atau aturan internal lainnya untuk mengelola platform pendanaan publik tersebut disertai mekanisme evaluasinya?

Nilai rata-rata terkait dokumen tertulis turun menjadi 2,70. Hal ini lagi-lagi mengindikasikan pentingnya kemauan dan kesepakatan organisasi media alternatif untuk membakukan banyak hal yang selama ini sebenarnya sudah mereka kerjakan.

Apakah media sudah melakukan kegiatan bersama audiens-komunitas-publik, seperti pelatihan dan diskusi?

Beberapa media menerapkan pola keanggotaan yang membuat relasi timbal-balik menjadi intens. Pertemuan antara awak media dengan audiensnya tidak hanya terjadi dalam artikel berita. Tidak sedikit media alternatif melibatkan audiens dalam diskusi secara rutin. Nilai 3,28 mengindikasikan dukungan responden terhadap pendekatan ini.

Apakah publik masih mempercayai media sebagai bagian penting dalam iklim kebebasan berkumpul dan berpendapat?

Kita sering meremehkan suara publik terkait media. Hasil survei ini menunjukkan bahwa kepercayaan publik terhadap media masih sangat tinggi, dengan nilai rata-rata 3,40. Fakta ini membuka peluang bagi media alternatif untuk terus mengambil peran dan memberikan dampak terutama dalam merawat iklim kekebasan berkumpul dan berpendapat di tengah kualitas demokrasi yang terus menurun.

Apakah negara memiliki peraturan yang memadai untuk melindungi iklim kebebasan berkumpul dan berpendapat?

Nilai rata-rata 2,66 menunjukkan bagaimana responden meyakini bahwa negara belum memiliki peraturan yang memadai untuk melindungi iklim kebebasan berkumpul dan berpendapat. Kondisi ini tentu mengkhawatirkan karena dapat menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan media alternatif yang mengambil sikap kritis dalam reportase-reportase mereka.

Apakah peraturan yang melindungi kebebasan berkumpul dan berpendapat, termasuk untuk informan jurnalistik sudah berjalan?

Keberadaan informan jurnalistik penting untuk mendukung kerja-kerja jurnalisme bermutu. Keselamatan mereka harus jadi prioritas. Sayangnya, responden dalam survei ini meyakini bahwa peraturan untuk melindungi kebebasan berkumpul dan berpendapat, termasuk untuk informan jurnalistik, belum berjalan sebagaimana mestinya. Nilai 2,13 menegaskan kekhawatiran tersebut.

c. Penguatan Organisasi

Secara umum, para pengelola media alternatif adalah jurnalis cum aktivis. Mereka adalah individu-individu yang selama ini sudah mempunyai pengalaman ber jurnalisme dan beraktivisme. Jadi secara umum, para pengelolanya sudah mempunyai pengalaman dalam membangun dan menguatkan organisasi. Namun apakah para pengelola media sudah menyediakan perangkat organisasi yang memadai seperti menyediakan jaminan sosial untuk jurnalis, memenuhi hak ketenagakerjaan, skema perlindungan jurnalis? Nilainnya adalah 2.7 atau semi viable. Jakarta, Bandung dan Kupang mempunyai nilai *semi-viable*, hanya Makassar yang mendapatkan nilai *less viable*.

Indikator penguatan organisasi dalam asesmen ini mencakup sejumlah sub-indikator yang hasilnya terpetakan sebagai berikut:

Apakah pekerja media (termasuk staf umum, freelance, kontributor konten) mendapatkan fasilitas program jaminan sosial dan kesehatan dari media/pemberi kerja (BPJS atau sejenisnya)?

Pertanyaan ini mendapatkan nilai 2.53 atau semi-viable. Para pekerja media di 4 kota rata-rata sudah mendapatkan fasilitas program jaminan sosial dan kesehatan, tidak hanya untuk jurnalis tetapi juga untuk staf umum. Ini artinya, walau media alternatif berpendapatan minim, namun mereka sudah memikirkan bagian penting yaitu memenuhi fasilitas jaminan sosial yang menjadi hak pekerja.

Apakah ada kebijakan atau program pemerintah yang secara khusus melindungi hak ketenagakerjaan jurnalis, kontributor sukarela, dan pekerja kreatif non-formal?

Ketika ada pertanyaan apakah ada program pemerintah yang secara khusus melindungi hak ketenagakerjaan bagi pekerja, hasil indikatornya menunjukkan angka 1.7 atau *less viable*. Sebagai media kecil (*small newsroom*) yang banyak menuliskan kasus-kasus publik, media alternatif sangat membutuhkan kebijakan perlindungan. Selain itu, banyaknya media alternatif yang belum terverifikasi Dewan Pers membuat posisinya menjadi rentan. Sejumlah media alternatif banyak mendapatkan serangan ketika melakukan peliputan seperti serangan digital, didatangi aparat, dll– hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum menjadi salah satu elemen penting untuk mereka.

Apakah organisasi pers atau asosiasi media menyediakan skema perlindungan atau advokasi kesejahteraan bagi jurnalis?

Walaupun belum lama dilakukan, sejumlah organisasi pers dan asosiasi media mulai mendiskusikan keberadaan media alternatif. Tidak hanya itu, organisasi seperti Aliansi Jurnalis Independen (AJI) juga mengadvokasi keberadaan media alternatif. Asosiasi

Media Siber Indonesia (AMSI) juga membuka peluang bagi media alternatif untuk menjadi anggota. Selain itu lahirnya Koalisi Media Alternatif (KOMA) pada Januari 2025, juga mengadvokasi perlindungan bagi media-media alternatif. Nilai pada indikator ini 2.82 atau semi-viable.

Apakah terdapat asosiasi atau jaringan media alternatif yang aktif di tingkat nasional atau regional disertai dukungan ekosistemnya?

Dalam asesmen ini nilainya 3.0 atau semi viable, ini menunjukkan adanya asosiasi jaringan media alternatif yang bertumbuh disertai ekosistemnya. Responden di 4 kota mengatakan bahwa asosiasi media alternatif tumbuh. Di tingkat nasional, ada jaringan media alternatif, Koalisi Media Alternatif (KOMA) yang anggotanya terdiri kurang lebih 40 media yang memperjuangkan perlindungan hukum bagi pers alternatif, kolaborasi peliputan, dan advokasi bagi suara publik yang tidak terwakili media arus utama.

Sejauh mana kolaborasi jaringan antar media mendukung pertukaran pengetahuan tentang manajemen dan penguatan organisasi?

Responden dalam indikator ini menilai bahwa jaringan antar media–mendukung pertukaran pengetahuan tentang manajemen dan penguatan organisasi, nilai dalam indikator ini 2.82 atau semi viable. Ini menunjukkan jaringan antar media yang berjalan, ada diskusi dan beragam cara mendukung pengetahuan. AJI bisa jadi salah satu contoh bagaimana penguatan pengetahuan dan penguatan terhadap advokasi media alternatif berjalan. Di KOMA, setiap 2 bulan sekali ada kelas penguatan organisasi bagi media anggota KOMA, juga berbagai kolaborasi liputan.

Apakah tersedia tenaga terlatih di bidang jurnalisme dan non-jurnalisme (keuangan, public engagement, dll.) yang dapat direkrut oleh media alternatif?

Untuk pertanyaan ini nilainya 3.0 atau semi viable. Beberapa media alternatif ada yang memiliki staf berjumlah 1-5 orang, 5-10 orang, dan 10-20. Rata-rata selain memiliki staf redaksi, yang memiliki 5-10 staf ini juga memiliki staf keuangan dan public engagement. Mereka bekerja dalam mengelola keuangan, dan mengelola komunitas. Staf public engagement ini penting dalam meraih suara komunitas dan melebarkan nilai-nilai gerakan jurnalisme publik, sebagaimana semangat pendirian media alternatif.

Sejauh mana lulusan perguruan tinggi berminat di profesi jurnalistik?

Lulusan perguruan tinggi yang berminat untuk bekerja sebagai jurnalis jumlahnya mengalami penurunan yang drastis di tengah kondisi lanskap media dan digital saat ini. Secara umum, mahasiswa tidak berminat masuk dunia jurnalistik karena mereka mengeluhkan waktu yang sangat panjang ketika bekerja–melebihi pekerjaan lain, ketidakpastian jenjang karir, dan gaji jurnalis pemula yang sering kali tidak sebanding dengan beban kerja dan risiko tinggi di lapangan. Di indikator ini, nilainya 2.50 atau less viable.

Apakah ada program beasiswa, magang, atau fellowship yang mengarahkan talenta muda ke media alternatif?

Pada pertanyaan ini, angkanya 2.53 atau semi viable. Media alternatif selama ini banyak menerima pekerja magang baik yang mendapatkan beasiswa, fellowship dan yang tidak. Disana mereka belajar bagaimana mengelola media kecil. Banyaknya startup yang muncul dan menjadi trend, membuat pekerja magang tertarik melihat secara langsung pengelolaan startup media kecil. Riset tentang media alternatif juga banyak diminati seiring dengan bertumbuhnya media alternatif yang memperjuangkan isu publik.



d. Keberlanjutan Finansial

Dari seluruh hasil *assesment*, keberlanjutan finansial mendapatkan penilaian less- viable, penilaian ini juga merupakan nilai terendah dari semua indikator dalam asesmen ini, yaitu 2.4 dengan rincian penilaian Jakarta (2.1/ *less viable*), Bandung (2.8/ *semi viable*), Makassar (2.0/ *less viable*) dan Kupang (2.6/ *semi viable*)

Hasil ini juga menunjukkan bahwa keberlanjutan finansial merupakan persoalan serius yang harus diatasi media alternatif. Masalah finansial utama pada media alternatif yaitu masih mencarinya model bisnis yang stabil, tidak adanya ceruk dana yang umumnya sudah diisi oleh media mainstream yang menyebabkan ketergantungan pada pendanaan yang sangat terbatas. Hal ini juga terlihat seperti dalam sulitnya menarik sponsor/ iklan, dana yang masih mengandalkan hibah/ grant dan minimnya variasi sumber dana.

Indikator keberlanjutan finansial dalam asesmen ini mencakup sejumlah hal, dan berikut adalah elaborasinya:

Apakah media memiliki variasi sumber pendapatan (iklan, donasi, langganan dll)?

Responden menyatakan bahwa secara umum variasi pendapatan pada media alternatif ini nilainya less viable atau belum memiliki sumber pendapatan seperti iklan, donasi, pelanggan, dll. Variasi pendapatan iklan di sejumlah media alternatif di kota ini didapatkan dari membership/ keanggotaan, crowdfunding dari komunitas, dan membuka usaha seperti cafe. Usaha-usaha kreatif lain dilakukan seperti menjual buku, merchandise, untuk mendapatkan dana, namun pendapatannya masih minim.

Apakah media memiliki sistem pencatatan keuangan yang terstruktur (pembukuan, laporan keuangan disertai kebijakan mencegah fraud)?

Media alternatif secara umum belum memiliki laporan keuangan yang terstruktur. Angka di kategori ini adalah 2,91 atau less viable. Dalam konstruksi kerja di media, sistem pencatatan keuangan ini penting untuk mencatat keluar masuknya uang/

pembukuan, membutuhkan aturan seperti Standar Operasional (SOP) agar mencegah terjadinya penipuan dan kecurangan (fraud). Pencatatan keuangan ini sangat krusial karena para pemberi dana akan meminta laporan keuangan di akhir masa pemberian dana, dan sejumlah pemberi dana meminta adanya audit keuangan yang berbasiskan laporan keuangan.

Apakah pemerintah memiliki skema pendanaan atau hibah yang secara khusus ditujukan bagi media alternatif atau media jurnalisme berkualitas?

Responden menyatakan bahwa pemerintah secara spesifik belum memiliki skema pendanaan atau hibah khusus untuk media alternatif atau hibah dana untuk jurnalisme berkualitas. Responden menilai 1,67 atau nilai terendah di kategori ini. Selama ini organisasi jurnalis, akademisi dan organisasi masyarakat sipil sudah memperjuangkan dana hibah untuk media alternatif yaitu dana jurnalisme- yang bisa didapatkan dari APBN dan APBD, namun perjuangannya masih terhenti di Dewan Pers yang masih menyusun rancangan aturan dana jurnalisme. Dana publik ini penting untuk mendukung keberlangsungan media alternatif.

Sejauh mana korporasi komersial, lembaga filantropi atau yayasan menyediakan dana yang dapat diakses oleh media alternatif?

Kategori dalam asesmen ini angkanya 2,97 atau less viable. Media alternatif selama ini sulit menjangkau korporasi komersial, lembaga filantropi dan yayasan. Lembaga komersial umumnya lebih memilih bekerja sama dengan media mainstream yang jangkauan pembacanya lebih banyak, sedangkan yayasan memberikan banyak persyaratan seperti media alternatif harus punya kantor, harus punya staf yang memadai, dll–padahal belum semua media alternatif memilikinya. Sedangkan untuk lembaga filantropi– ada lembaga-lembaga yang memperoleh dananya dari korporasi atau dana CSR perusahaan besar yang nilai-nilai perusahaannya belum tentu berkesesuaian dengan perjuangan media alternatif.

Apakah dana eksternal yang tersedia (dari pemerintah, filantropi atau korporasi komersial) mendukung keberlanjutan jangka panjang, bukan hanya proyek jangka pendek?

Secara umum, dana eksternal ini baik yang berasal dari pemerintah, filantropi maupun korporasi komersial- dinilai less viable dengan angka 2.30. Ini artinya ketiganya belum mendukung keberlanjutan media alternatif, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Sejauh mana pengiklan bersedia bekerja sama dengan semua media dan jurnalisme berkualitas secara umum?

Pertanyaan ini juga mendapatkan angka sangat kecil yaitu 2.12 yang menunjukkan bahwa pengiklan belum bersedia untuk bekerjasama dengan media alternatif untuk jurnalisme berkualitas. Pengiklan secara umum lebih menyukai bekerjasama dengan media mainstream yang jangkauan pembacanya lebih luas dengan produksi berita yang lebih disukai khalayak luas. Sejumlah media alternatif yang memperjuangkan jurnalisme berkualitas, belum dilirik oleh pengiklan karena pembacanya dinilai kecil dan sangat spesifik.

Apakah platform digital besar memberikan peluang monetisasi yang dapat diakses media?

Pertanyaan ini mendapatkan nilai 2.68 atau less viable. Asesmen membuktikan, bahwa platform digital besar belum memberikan peluang monetisasi yang bisa diakses media alternatif. Media alternatif memproduksi konten jurnalisme, namun posisinya hanya sebagai penyumbang informasi- tak mendapatkan hasil dari produksi beritanya. Sementara untuk memproduksi berita, media alternatif harus memikirkan dari mana mendapatkan dananya.

Apakah ada kebijakan insentif fiskal (misalnya keringanan pajak) dan anggaran iklan khusus pemerintah bagi media?

Perjuangan untuk mendapatkan dana jurnalisme menjadi sangat penting jika kita melihat hasil asesmen yang mendapatkan nilai sangat kecil disini, yaitu 2.70. Dana jurnalisme diperjuangkan agar media alternatif mendapatkan dana peliputan, dana fellowship, dana pengembangan media, atau dana keringanan pajak. Namun melihat angka disini yang sangat kecil, ini menunjukkan tidak adanya kebijakan fiskal/ keringanan pajak iklan khusus pemerintah untuk media alternatif. Pengurangan dana fiskal berguna untuk meringankan beban media-media kecil.

Sejauh mana regulasi media mendukung diversifikasi pendapatan media?

Regulasi atau kebijakan media belum mendukung diversifikasi pendapatan media. Hasil asesmen ini sangat kecil, 2.06. Hal ini menunjukkan kondisi finansial media alternatif yang diharuskan untuk memikirkan nasibnya sendiri. Jika ada regulasi, maka ada kebijakan bagi media alternatif untuk membantu mereka memperjuangkan jenis produk, usaha, atau jenis investasi agar tidak bergantung pada satu hal saja. Namun semua ini belum masuk dalam kebijakan/ regulasi

Apakah ada regulasi yang melindungi media dari praktik persaingan tidak sehat?

Asesmen dari pertanyaan ini nilainya 1.80 atau less viable. Ini menunjukkan belum adanya regulasi yang melindungi media alternatif dari praktek persaingan tidak sehat. Persaingan tidak sehat bisa terjadi ketika adanya dominasi dari platform digital besar yang menggunakan algoritma yang tidak transparan untuk mengatur distribusi konten berita dan iklan, juga bisa dari monopoli penguasaan iklan digital dan penguasaan data informasi. Media alternatif banyak diabaikan hak-haknya oleh mereka.

Apakah terdapat jaringan kolaborasi antar media alternatif untuk berbagi sumber daya finansial?

Salah satu pembentukan kolaborasi antar media alternatif fungsinya adalah untuk berbagi sumber daya finansial. Sejauh ini kolaborasi media alternatif dilakukan, dan beberapa sudah sampai sampai pada tahap berbagi sumber daya finansial. Sejauh ini kolaborasi juga dilakukan untuk advokasi dan peliputan bersama. Asesmen di indikator ini mendapatkan nilai 2.77 atau semi viable.

Sejauh mana organisasi masyarakat sipil membantu media dalam mengakses pendanaan?

Sejauh ini organisasi masyarakat sipil (OMS) sudah banyak berjejaring dengan media-media alternatif, seperti memberikan data peliputan, mengundang dan menginformasikan advokasi yang diperjuangkan organisasi masyarakat sipil. Dengan nilai 2.70 atau semi viable, menunjukkan banyak OMS yang sudah membantu akses pendanaan bagi media alternatif. Di beberapa kota yang menjadi bagian dari survey asesmen ini, OMS memberikan dana kolaborasi bagi media alternatif untuk membuat peliputan dan kampanye. Kolaborasi ini penting untuk meluaskan perjuangan publik yang menjadi konsentrasi perjuangan OMS dan media alternatif dimana keduanya memiliki kemiripan perjuangan.

Apakah terdapat platform atau wadah kolaborasi pendanaan bagi media di tingkat nasional?

Dengan kecilnya nilai asesmen dalam kategori ini, 1.90, ini menunjukkan minimnya platform atau wadah kolaborasi pendanaan media alternatif di tingkat nasional. Wadah ini seharusnya diperjuangkan untuk memberikan dana peliputan jurnalisme berkualitas untuk keberlangsungan media alternatif nasional. Platform atau wadah ini bentuknya bisa bermacam-macam, seperti koperasi, crowdfunding, atau donasi dari membership atau komunitas. Sejauh ini ada organisasi yang mendukung, namun belum berbentuk platform khusus untuk pendanaan.



e. Adaptasi Teknologi

Dalam hal adaptasi teknologi, media alternatif di Indonesia berada pada skor agregat nasional sebesar 2,6, pada kategori *Semi-Viable*. Angka ini berada di ambang bawah rentang kelayakan (2,51-3,25), hanya sedikit di atas kriteria *Less Viable*. Skor ini menggambarkan situasi transisi yang rentan. Bisa dikatakan, sebagian besar ruang redaksi alternatif telah mengadopsi perangkat digital dasar untuk memproduksi dan mendistribusikan konten, namun belum memiliki kedaulatan infrastruktur teknologi yang kokoh untuk menjamin keberlanjutan dan independensi jangka panjang.

Kondisi *Semi-Viable* ini juga menyisakan kerentanan struktural terhadap keamanan digital dan independensi informasi. Tanpa infrastruktur komputasi mandiri dan sistem pertahanan siber yang terlatih, media alternatif rentan mengalami sensor digital, peretasan, hingga penutupan sepihak (*deplatforming*) saat mengangkat isu-isu publik yang bersinggungan dengan kepentingan politik dan ekonomi mapan. Akses teknologi yang belum sepenuhnya berdaulat membuat posisi tawar media relatif lemah ketika menghadapi represi digital.

Secara keseluruhan, angka 2,6 menjadi alarm bahwa adaptasi teknologi media alternatif di tingkat nasional belum bergerak ke arah resiliensi sejati. Tanpa adanya strategi penguatan kapasitas infrastruktur, media alternatif berisiko terus berada di tepi jurang *less viable*.

Indikator Adaptasi Teknologi dalam asesmen media viability ini mencakup tujuh sub indikator, dan berikut rinciannya:

Media memiliki akses pada teknologi untuk memproduksi dan mendistribusikan informasi secara adil dan bebas dari kepentingan politik. Media memiliki alat fisik yang dibutuhkan untuk membuat berita yang adil bebas dari kepentingan politik."

Apakah media memiliki alat produksi terkini yang memadai?

Skor 3,21 menempatkan kepemilikan alat produksi terkini pada kategori ***Semi-Viable***, namun posisinya berada tepat di ambang batas atas kategori tersebut dan mendekati status *Viable* (3,26–4,00). Angka ini mengindikasikan bahwa secara operasional, media alternatif telah memiliki perangkat kerja dasar yang fungsional dan relevan untuk menjalankan aktivitas jurnalistik harian secara mandiri. Redaksi tidak lagi berada dalam kondisi kelangkaan alat yang ekstrem atau ketergantungan total pada pinjaman pihak luar, sehingga proses produksi berita dapat berlangsung relatif otonom tanpa intervensi langsung dari kepentingan politik pemilik modal atau penguasa lokal.

Apakah media memiliki akses terhadap semua platform produksi dan distribusi yang ada secara adil?

Skor 2,94 pada kategori Semi-Viable mencerminkan bahwa media alternatif pada dasarnya memiliki akses teknis yang terbuka untuk masuk dan memanfaatkan berbagai kanal produksi maupun platform distribusi digital arus utama (seperti media sosial, agregator, atau mesin pencari). Di atas kertas, tidak ada hambatan administratif atau pemblokiran mutlak yang melarang media independen untuk mempublikasikan konten mereka di ruang publik digital. Namun, penurunan skor dari 3,21 (pada alat produksi fisik) menjadi 2,94 (pada akses platform) menunjukkan adanya jurang persoalan substantif: akses teknis yang dimiliki belum diiringi oleh rasa keadilan (*fairness*) dalam ekosistem distribusi informasi itu sendiri. Meski media bebas mengunggah konten, distribusi mereka sangat tersubordinasi oleh logika algoritma komersial yang buram, bias terhadap sensasionalisme atau skala modal iklan, serta rentan terhadap sensor sepihak (*shadowbanning* maupun penalti konten) saat mengangkat isu-isu kritis. Kondisi *semi-viable* di angka 2,94 menegaskan bahwa kendati tidak disensor langsung oleh negara di level platform, mereka tetap menghadapi "disiplin pasar digital" yang tidak setara, karya jurnalistik berbasis kepentingan publik kerap tenggelam tanpa jaminan amplifikasi yang proporsional dan transparan.

Memiliki perangkat analitik data internal (*data dashboard, user insight, engagement metric, google analytics*). Media memiliki dasbor data internal yang bisa diakses redaksi secara real-time.

Apakah media sudah memanfaatkan data untuk menentukan perencanaan konten dan strategi audiens?

Skor 3,26 menempatkan pemanfaatan data untuk perencanaan konten dan strategi audiens tepat di ambang batas bawah kategori ***Viable*** (rentang 3,26 – 4,00). Angka ini menandai lompatan kultural dan operasional yang signifikan bagi media alternatif: ruang redaksi tidak lagi semata-mata mengandalkan intuisi jurnalistik atau dorongan

idealisme buta dalam memproduksi karya, melainkan telah mengintegrasikan bukti empiris ke dalam alur kerja redaksional. Penggunaan instrumen analitik (seperti *dashboard* internal, metrik keterlibatan, maupun Google Analytics) telah menjadi rujukan fungsional untuk membaca perilaku pembaca, mengenali isu-isu yang beresonansi kuat di akar rumput, serta menyusun strategi distribusi konten yang lebih terukur. Kendati telah menembus batas kelayakan (*Viable*), posisinya yang berada persis di angka pembuka (3,26) mencerminkan bahwa adopsi kultur data ini masih berada pada fase instrumental awal dan rentan terkikis jika tidak dibarengi penguatan kapasitas analitis lanjutan. Skor ini menegaskan bahwa fondasi *data-driven journalism* sudah terbangun dengan baik, tetapi tantangan berikutnya adalah menjaga agar ketergantungan pada metrik tidak mendikte agenda editorial kritis atau mengikis garis idealisme alternatif demi sekadar mengejar angka performa.

"Memiliki kemampuan untuk memitigasi dan menanggulangi serangan siber dan perlindungan data. Media memiliki sistem keamanan berlapis (*firewall*, audit keamanan berkala, dan enkripsi ujung-ke-ujung) serta kepatuhan penuh terhadap regulasi perlindungan data pribadi"

Apakah media memiliki sistem keamanan digital untuk melindungi aset digital?

Skor 2,83 menempatkan kepemilikan sistem keamanan digital pada kategori ***Semi-Viable*** (rentang 2,51 – 3,25). Angka ini menunjukkan bahwa kesadaran (*awareness*) dan proteksi dasar terhadap aset digital telah hadir di ruang redaksi media alternatif yang dinilai. Pengelola media umumnya telah menerapkan protokol pertahanan elementer—seperti penggunaan autentikasi dua faktor (2FA), manajemen kata sandi, pencadangan data berkala (*backup*), serta pemanfaatan sertifikat enkripsi standar (SSL/TLS) pada situs web mereka. Artinya, media tidak lagi sepenuhnya buta atau pasrah terhadap ancaman siber, dan telah memiliki benteng awal untuk menangkal gangguan digital skala rendah hingga menengah. Namun demikian, berada di kisaran 2,83 mengindikasikan bahwa sistem keamanan yang dibangun masih bersifat reaktif, parsial, dan belum melembaga sebagai infrastruktur pertahanan yang komprehensif. Situasi Semi-Viable ini menyisakan kerentanan struktural: ketika media menerbitkan investigasi berisiko tinggi yang memicu serangan siber terkoordinasi dari aktor politik atau kekuatan modal yang kuat, infrastruktur digital mereka masih berpotensi lumpuh (*downtim*e) dan membutuhkan bantuan darurat dari jejaring eksternal pembela kebebasan pers.

Selalu menyesuaikan diri dengan berbagai perkembangan teknologi baru. Media aktif melakukan inovasi dan adaptasi dengan berbagai perkembangan teknologi baru

Apakah redaksi selalu mencoba teknologi baru dalam produksi dan pengembangan platform distribusi berita?

Skor 3,21 menempatkan kemauan dan keaktifan redaksi dalam menguji coba teknologi baru pada kategori ***Semi-Viable*** (rentang 2,51 – 3,25), berada di posisi yang sangat tinggi dan mengetuk pintu kategori *Viable* (mulai 3,26). Angka ini mencerminkan etos eksploratif dan agilitas kultur kerja yang kuat di tubuh media alternatif yang dinilai. Redaksi tidak bersikap resisten atau pasif terhadap disrupsi gelombang baru. Keterbukaan adaptif ini menjadi bukti bahwa keterbatasan sumber daya ekonomi tidak

mematikan daya kreasi teknologi di tingkat awak redaksi. Catatannya, selisih tipis yang menahannya tetap berada di status *Semi-Viable* mengindikasikan bahwa inovasi teknologi tersebut kerap berjalan tanpa dukungan infrastruktur riset dan pengembangan (*R&D*) yang berkesinambungan. Eksperimen teknologi baru sering kali bersifat sporadis, didorong oleh antusiasme individu (*champion*) di redaksi, atau berlangsung sebatas adaptasi tambal-sulam (*trial and error*) tanpa strategi adopsi jangka panjang yang mapan.

Apakah media memiliki sumber daya yang dialokasikan untuk riset, pengembangan, dan pelatihan teknologi bagi staf?

Skor 2,57 menempatkan alokasi sumber daya untuk riset, pengembangan (R&D), dan pelatihan teknologi staf pada kategori ***Semi-Viable*** (rentang 2,51 – 3,25), namun posisinya sangat dekat dengan batas bawah kategori dan hampir tergelincir ke Less-Viable (≤ 2,50). Angka ini mencerminkan paradoks yang tajam jika dikomparasikan dengan skor 3,21 pada indikator sebelumnya (5.4.1 mengenai antusiasme mencoba teknologi baru): redaksi memiliki kemauan adaptasi yang tinggi, tetapi komitmen material dan institusional organisasi untuk menopangnya masih sangat minim. Peningkatan kapasitas teknologi di tubuh media alternatif umumnya masih mengandalkan inisiatif mandiri jurnalis (otodidak) atau barangkali bergantung pada program lokakarya gratis yang diselenggarakan donor dan asosiasi jurnalisme eksternal, bukan berasal dari skema investasi internal yang dirancang teratur.

Kondisi di angka 2,57 ini menegaskan kerentanan model operasional media alternatif yang umumnya menerapkan sistem "anggaran bertahan hidup" (*survival budget*). Dalam alokasi kas yang serba terbatas, pos anggaran untuk pelatihan staf dan riset teknologi hampir selalu menjadi pos pertama yang dikorbankan demi menutupi biaya operasional rutin peliputan dan honorarium awak redaksi. Ketiadaan alokasi sumber daya yang pasti ini mengancam keberlanjutan media dalam jangka panjang. Tanpa peningkatan keterampilan teknologis yang merata dan berkelanjutan, media alternatif akan rentan tertinggal oleh cepatnya evolusi lanskap digital dan berisiko kehilangan efisiensi produksinya.

Audiens memiliki literasi, mampu berinteraksi secara sehat di ruang digital; mampu memproduksi konten balasan yang edukatif dan menghargai etika komunikasi digital digital yang baik.

Apakah audiens sudah kritis dan fasih berinteraksi secara sehat di ruang digital; mampu memproduksi konten balasan yang edukatif dan menghargai etika komunikasi digital?

Skor 2,70 menempatkan tingkat literasi kritis dan kesehatan interaksi digital audiens pada kategori *Semi-Viable* (rentang 2,51 – 3,25). Angka ini mencerminkan bahwa media alternatif telah memiliki basis audiens inti (*core community*) yang mampu berdiskusi secara substantif dan menghargai etika komunikasi publik. Untuk melompat ke kategori Viable (3,26 – 4,00), media alternatif perlu mengembangkan cara-cara untuk mengorkestrasi keterlibatan warga. Langkah strategis yang perlu diambil, misalnya, membangun ruang deliberasi terkurasi (walled gardens seperti forum internal atau kanal komunitas privat) yang dilindungi oleh pedoman komunitas tegas, sembari membuka rubrik partisipatif agar audiens terlatih memproduksi konten balasan

edukatif berbasis data lapangan. Selain itu, baik juga untuk menyelenggarakan edukasi literasi media serta memberdayakan pembaca loyal sebagai duta etika (community champions), sehingga audiens bertransformasi menjadi komunitas warga berdaya yang secara organik membela integritas ruang digital media dari manipulasi dan polarisasi destruktif.

Apakah audiens aktif mencari sumber berita kredibel dan memiliki kemampuan dasar untuk melakukan cek fakta secara mandiri?

Skor 2,60 menempatkan inisiatif audiens dalam mencari sumber kredibel dan melakukan cek fakta mandiri pada kategori ***Semi-Viable*** (rentang 2,51 – 3,25), berada sangat tipis di atas ambang batas *Less-Viable* (≤ 2,50). Angka ini mencerminkan bahwa ceruk audiens media alternatif mulai memiliki kesadaran skeptisisme sehat. Mereka tidak serta-merta menelan mentah-mentah disinformasi dan cenderung memvalidasi isu hangat dengan mengunjungi media independen tepercaya. Namun, posisinya yang mendekati batas bawah menunjukkan bahwa kemandirian verifikasi ini masih pasif dan terbatas. Mayoritas audiens luas masih mengonsumsi berita secara sporadis dari linimasa media sosial tanpa metodologi perbandingan sumber yang ajek, serta belum menguasai kecakapan teknis dasar verifikasi digital (seperti penelusuran gambar terbalik/*reverse image search* atau pembacaan dokumen resmi).

Apakah audiens memahami dasar-dasar keamanan digital (seperti privasi), mampu mengkritisi narasi media yang bias atau manipulatif?

Skor 2,64 menempatkan pemahaman audiens terkait dasar-dasar keamanan digital dan kecakapan mengkritisi narasi bias pada kategori ***Semi-Viable*** (rentang 2,51 – 3,25), berada di paruh bawah yang rawan tergelincir ke *Less-Viable* (≤ 2,50). Angka ini menunjukkan bahwa audiens media alternatif mulai memiliki kepekaan kritis terhadap manipulasi informasi dan propaganda politik, Mereka mampu mengenali sudut pandang (*framing*) yang tendensius pada media arus utama partisan. Namun, kesadaran kritis ini belum berbanding lurus dengan praktik higienitas keamanan digital dan perlindungan privasi diri yang memadai. Sebagian besar pembaca masih abai terhadap jejak digital, keamanan data pribadi di ruang terbuka, serta potensi doxing atau intimidasi digital ketika merespons isu-isu publik yang sensitif. Untuk meningkatkan keterampilan audiensnya agar bisa bergerak ke kategori Viable (3,26 – 4,00), media alternatif dapat mengembangkan konten-konten edukasi seputar panduan praktis keamanan digital (seperti tata cara memproteksi akun, anonimitas saat bersuara, dan enkripsi data sederhana) yang dikemas secara populer di sela-sela liputan mendalam atau investigatif.

Layanan teknologi digital yang merata. Tersedia infrastruktur digital secara merata dan masyarakat memiliki kemampuan mengakses layanan digital"

Apakah infrastruktur digital merata dan masyarakat memiliki kemampuan mengakses layanan digital seperti transmitter, listrik, internet broadband terkini, dll sehingga memungkinkan akses konten tanpa hambatan?

Skor 2,30 menempatkan pemerataan infrastruktur digital dan daya akses masyarakat pada kategori *Less-Viable* (rentang 1,76 – 2,50). Angka ini mengonfirmasi adanya kesenjangan digital struktural yang nyata di wilayah media alternatif. Meski teknologi

dasar seperti sinyal seluler sudah menjangkau sebagian kawasan, ketersediaan listrik yang stabil, pemancar (*transmitter*), dan jaringan internet pita lebar (*broadband*) berkualitas tinggi belum terdistribusi merata hingga ke komunitas akar rumput dan wilayah periferal. Akibatnya, masyarakat di luar pusat-pusat kota menghadapi hambatan material yang berat, mulai dari koneksi yang lambat, kuota internet komersial yang mahal, hingga pemadaman listrik berkala, yang secara langsung membatasi kemampuan publik untuk mengakses karya jurnalistik media alternatif secara konsisten dan tanpa hambatan teknis. Kondisi *Less-Viable* ini memperlihatkan bahwa hambatan adaptasi teknologi tidak semata-mata bersumber dari kesiapan internal redaksi, melainkan tersandera oleh keterbatasan infrastruktur publik di ranah eksternal.

Apakah koneksi internet stabil, terjangkau oleh mayoritas masyarakat, berbasis layanan broadband terkini?

Skor 2,30 menempatkan stabilitas, keterjangkauan, dan kemutakhiran koneksi internet masyarakat pada kategori ***Less-Viable*** (rentang 1,76 – 2,50). Angka ini menegaskan bahwa mayoritas warga di wilayah sasaran media alternatif belum menikmati koneksi internet pita lebar (*broadband*) yang andal dan terjangkau secara ekonomi. Akses publik masih didominasi oleh paket data seluler berbasis kuota komersial yang relatif mahal dan rentan mengalami ketidakstabilan sinyal (*throttling* atau fluktuasi jaringan), terutama saat berada di kawasan luar inti perkotaan. Situasi ini menciptakan ketimpangan konsumsi informasi: warga terpaksa berhemat kuota internet dan lebih memprioritaskan komunikasi esensial ketimbang membuka situs jurnalisme mendalam yang memuat analisis panjang, grafis data, atau video dokumenter publik.

"Transparansi dan keadilan algoritma platform digital. Ada jaminan regulasi dan regulator yang mengatur kesetaraan relasi media jurnalisme dengan platform digital serta dukungan platform untuk jurnalisme berkualitas"

Apakah algoritma platform bersifat transparan dan adil; terdapat sistem bagi hasil (revenue sharing) yang proporsional sehingga media lokal bisa tumbuh secara ekonomi?

Skor 2,02 menempatkan transparansi algoritma platform digital dan keadilan sistem bagi hasil pada kategori *Less-Viable* (rentang 1,76 – 2,50). Angka ini membongkar realitas keras asimetri kekuasaan antara media lokal/alternatif dengan perusahaan platform raksasa (*Big Tech*). Kebijakan distribusi konten sepenuhnya dikendalikan oleh "kotak hitam" algoritma yang tidak transparan, kerap berubah tanpa pemberitahuan, dan secara inheren memprioritaskan sensasionalisme atau metrik viralitas ketimbang jurnalisme berkualitas yang berpihak pada kepentingan publik. Dalam hal ekonomi, skema monetisasi digital dan bagi hasil (*revenue sharing*) programatik yang ada terbukti timpang dan marjinal bagi media lokal, di mana porsi pendapatan terbesar disedot perantara teknologi, menyisakan remah finansial yang jauh dari kata layak untuk menopang biaya operasional jurnalisme independen. Secara mandiri, media alternatif harus memutus ketergantungan monetisasi berbasis klik (*traffic-dependent revenue*) dengan memperkuat model ekonomi berbasis komunitas, seperti keanggotaan (*membership*), donasi publik langsung, atau penjualan produk keahlian jurnalistik lokal.

Apakah platform digital menyediakan alat bantu (tools) bagi media untuk memahami performa konten dan mulai ada program dukungan pendanaan untuk jurnalisme?

Skor 2,38 menempatkan ketersediaan alat bantu analitik dari platform serta keberadaan program dukungan pendanaan jurnalisme pada kategori ***Less-Viable*** (rentang 1,76 – 2,50). Angka ini mengindikasikan bahwa instrumen dan inisiatif kemitraan yang disediakan platform digital raksasa masih sangat berjarak dan belum menyentuh kebutuhan riil media alternatif/lokal. Kendati platform menyediakan dasbor analitik performa dasar, data yang disajikan kerap terbatas pada metrik algoritma permukaan yang mendorong produksi konten berorientasi klik, bukan alat ukur yang membantu memetakan dampak sosial liputan publik.

Apakah sudah terjadi komunikasi yang baik dari platform ke media dan manajemen algoritma berita sudah seimbang?

Skor 2,19 menempatkan kualitas komunikasi dari platform ke media serta keseimbangan tata kelola algoritma berita pada kategori ***Less-Viable*** (rentang 1,76 – 2,50). Angka ini membongkar kebuntuan komunikasi yang asimetris: interaksi antara platform digital raksasa dan pengelola media alternatif nyaris tidak ada atau berlangsung satu arah melalui sistem notifikasi otomatis tanpa ruang klarifikasi yang manusiawi. Ketiadaan keseimbangan manajemen algoritma ini membuat ruang redaksi alternatif terus bekerja dalam ketidakpastian dan kerentanan distribusi yang tinggi.

f. Perlindungan Hukum dan Keterbukaan Informasi

Pada indikator pengakuan, perlindungan hukum dan keterbukaan informasi memperoleh skor nasional 2,4, dalam kategori *Less Viable*. Dalam menjalankan operasionalnya, media alternatif masih menghadapi tantangan untuk memperoleh pengakuan formal, perlindungan hukum, menjalankan kebebasan berekspresi serta akses informasi publik. Kondisi ini salah satunya tercermin dari proses verifikasi di Dewan Pers. Tidak semua media alternatif memiliki kapasitas yang bisa untuk memenuhi persyaratan verifikasi. Verifikasi di Dewan Pers meliputi, verifikasi administrasi antara lain tentang aspek badan hukum, struktur organisasi, ketenagakerjaan, konten dan verifikasi faktual.

Belum adanya pengakuan hukum serta perlindungan hukum, membuat kondisi media cukup rentan. Media dan jurnalis masih menghadapi risiko intimidasi, kekerasan, serangan digital dan juga tekanan pemberitaan. Laporan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) pada 2025, cukup menggambarkan realitas kerentanan tersebut. Laporan menyebutkan adanya 89 kasus kekerasan terhadap jurnalis sepanjang 2025, termasuk 29 kasus serangan digital. Di sisi lain, keterbukaan ruang digital juga masih menjadi persoalan. Pada 22 Juli 2026, AJI, SAFEnet, Magdalene.co, dan Project Multatuli mengajukan uji materi terhadap PP 71/2019 terkait moderasi konten karena dinilai berpotensi mengancam kebebasan berekspresi dan hak atas informasi.

Idealnya keberlanjutan media alternatif tidak hanya ditopang dari kondisi (kapasitas) internal media, namun juga ekosistem yang mendukung. Baik itu ekosistem perlindungan hukum, keterbukaan informasi, serta kebijakan ruang digital yang lebih aman.

Indikator Pengakuan, Perlindungan Hukum dan Keterbukaan Informasi dalam asesmen ini mencakup delapan subindikator, berikut rinciannya:

Status Legal dan Pengakuan Formal

Apakah sudah ada regulasi yang memberi kemudahan bagi media jurnalisme berkualitas untuk memperoleh pengakuan formal/legal dari Dewan Pers?

Sudah ada regulasi yang memberi kemudahan bagi media untuk memperoleh pengakuan formal/legal dari Dewan Pers, namun masih terbatas. Skor 2,36 menunjukkan media alternatif masih terbatas mendapat pengakuan legal/formal dari Dewan Pers. Ruang untuk media alternatif melakukan verifikasi masih terbatas, belum mudah diakses. Proses verifikasi administrasi dan faktual yang diberlakukan Dewan Pers menuntut persyaratan yang cukup sulit dipenuhi media alternatif. Misalkan, bentuk kelembagaan, syarat ketenagakerjaan dan lainnya.

Perlindungan Hukum terhadap Jurnalis dan Media

Apakah media memiliki kebijakan internal untuk melindungi jurnalis dari ancaman, kriminalisasi, kekerasan dan kekerasan seksual?

Skor 2,96, menunjukkan media alternatif telah memiliki mekanisme internal/kebijakan untuk melindungi jurnalisnya dari upaya kriminalisasi, ancaman, kekerasan dan kekerasan seksual. Pada masing-masing media penerapannya belum sepenuhnya kuat dan seragam. Di era digital kini risiko terhadap jurnalis semakin beragam. Risiko serangan juga meliputi serangan digital. Riset AJI pada 2025, terhadap 2.020 jurnalis menunjukkan 75,1% responden pernah mengalami kekerasan baik fisik, maupun serangan digital.

Apakah media telah memiliki jaringan kerja sama dengan organisasi /lembaga yang memberikan perlindungan hukum dan advokasi terhadap jurnalis?

Media alternatif telah memiliki jaringan kerja sama dengan organisasi/lembaga yang memberikan perlindungan hukum dan advokasi terhadap jurnalis. Ini ditunjukkan dari skor asesmen yakni 3,06. Jaringan kerja sama ini menjadi penting bagi media alternatif yang tidak memiliki sumber daya hukum, misalkan bagian legal, kuasa hukum. Keberadaan jaringan ini juga menjadi energi dukungan ketika jurnalis media alternatif menghadapi kekerasan maupun persoalan hukum.

Akses terhadap Keadilan dan Mekanisme Sengketa Pers

Apakah media memiliki prosedur penanganan pengaduan atau keberatan publik (hak jawab, koreksi, dll)?

Skor 3,40 menunjukkan media alternatif telah memiliki prosedur penanganan keberatan publik baik itu tentang hak jawab dan koreksi. Media alternatif sadar mekanisme koreksi dan penyelesaian keberatan merupakan bagian dari akuntabilitas pers. Ini untuk mencegah persoalan pemberitaan bisa berkembang menjadi sengketa hukum. Penyelesaian melalui mekanisme pers dapat memberi ruang bagi media dan pihak yang keberatan untuk menyelesaikan secara proporsional sesuai UU Pers.

Apakah media mengetahui prosedur mediasi sengketa melalui Dewan Pers?

Hasil asesmen menunjukkan skor 3,26, ini menggambarkan pengetahuan media alternatif mengenai mekanisme penyelesaian sengketa melalui Dewan Pers relatif baik. Media alternatif mengetahui keberadaan Dewan Pers sebagai jalur penyelesaian pengaduan terkait karya jurnalistik. Penguatan literasi mengenai prosedur pengaduan dan mediasi tetap diperlukan agar mekanisme tersebut tidak hanya diketahui, tetapi juga diterapkan ketika terjadi sengketa.

Status Legal dan Pengakuan Formal

Apakah regulasi media di Indonesia mengakui keberadaan media alternatif atau media komunitas?

Skor 2,23, hasil asesmen menunjukkan pengakuan keberadaan media alternatif atau media komunitas masih dipersepsikan belum kuat dalam regulasi tentang media Indonesia. Media alternatif memiliki karakter kelembagaan, model bisnis, dan audiens yang beragam. Ini berbeda dengan bentuk kelembagaan, model bisnis maupun audiens media *mainstream*/konvensional, sehingga keduanya tidak bisa ditempatkan dalam syarat formal kelembagaan yang sama. Hal ini menciptakan ruang abu-abu bagi sebagian media yang menjalankan fungsi jurnalistik tetap belum memiliki bentuk kelembagaan sesuai standar formal yang ditetapkan oleh Dewan Pers. Melihat kondisi ini, tantangannya bukan menurunkan standar profesionalisme, melainkan lebih memastikan kerangka regulasi untuk bisa mengakomodasi keragaman bentuk media yang berbeda.

Sejauh mana mekanisme verifikasi media dapat diakses oleh media alternatif?

Hasil asesmen ini meraih Skor 2,23. Responden menilai mekanisme verifikasi Dewan Pers belum sepenuhnya bisa diakses oleh media alternatif. Persyaratan administrasi dan kelembagaan menjadi tantangan bagi media alternatif yang memiliki sumber daya terbatas. Masih banyak media alternatif yang belum bisa memenuhi syarat yang diwajibkan dalam verifikasi tersebut. Ini menunjukkan pentingnya pendampingan agar media alternatif tidak hanya diwajibkan memenuhi standar tapi juga memperoleh akses memadahi untuk bisa dinyatakan Terverifikasi.

Apakah terdapat kebijakan untuk mengakomodasi keberagaman institusi media?

Skor 2,15 menunjukkan masih terbatasnya kebijakan yang mengakomodasi keragaman bentuk dan karakter institusi media. Keragaman media di Indonesia mencakup perusahaan media mainstream, media komunitas, media nirlaba, media alternatif. Pendekatan kebijakan masing-masing media idealnya berbeda dengan tetap mempertahankan standar jurnalistik. Kebijakan yang diterapkan juga tidak menjadikan model kelembagaan media besar sebagai satu-satunya rujukan. Hal ini berarti bukan hanya soal legalitas, tetapi kesesuaian regulasi yang mengakomodir keragaman media.

Perlindungan Hukum terhadap Jurnalis dan Media

Sejauh mana hukum melindungi jurnalis dari kriminalisasi?

Perlindungan hukum terhadap jurnalis dari upaya kriminalisasi dinilai belum kuat. Skor 2,15 menunjukkan hal itu. UU Pers telah mengatur perlindungan kerja jurnalistik, dalam praktiknya jurnalis masih menghadapi risiko pidana maupun tekanan hukum terkait kerja mereka. Keberadaan norma perlindungan hukum belum selalu berbanding lurus dengan rasa aman saat menjalankan kerja jurnalistik.

Sejauh mana media alternatif dapat menggunakan perlindungan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers?

Media alternatif mengetahui dan dapat menggunakan kerangka perlindungan UU Pers. Skor hasil asesmen ini sebesar 2,68, yang artinya pemahaman mereka tentang hal itu belum sepenuhnya optimal. Hambatan yang muncul karena status kelembagaan, kapasitas pendampingan, pemahaman hukum, maupun posisi media ketika menghadapi aparat atau pihak yang memiliki sumber daya hukum lebih besar. Penguatan kapasitas hukum menjadi penting agar media alternatif tidak hanya mengetahui keberadaan UU Pers tetapi mampu menggunakannya secara efektif ketika bersengketa atau mengalami intimidasi dan atau kriminalisasi.

Apakah kasus kekerasan terhadap jurnalis ditangani aparat penegak hukum secara serius?

Skor 1,70 menunjukkan penanganan terhadap jurnalis oleh penegak hukum dinilai belum cukup serius. Amnesty International Indonesia mencatat hingga Juni 2025 belum ada laporan mengenai polisi yang diproses pidana secara tuntas atas sejumlah kasus kekerasan terhadap jurnalis. Ini menggambarkan ada persoalan serius terkait akuntabilitas dan transparansi proses hukum.

Kebebasan Berekspresi dan Antisensor

Bagaimana penerapan UU Pers No 40 / 1999 terhadap kebebasan pers dan praktik sensor?

Penerapan UU Pers dalam menjamin kebebasan pers dan praktik sensor belum optimal. Skor 2,21 hasil asesmen menunjukkan hal itu. UU Pers memang menjamin kemerdekaan pers, tetapi dalam realitanya masih ada tekanan terhadap media dan jurnalis. Temuan AJI mencatat ada praktik penghapusan berita, pelarangan liputan hingga praktik swansor. Tantangan kebebasan pers tidak hanya dari sensor formal tetapi juga dari tekanan yang mendorong media melakukan pembatasan sendiri.

Apakah kerja sama dengan pemerintah dan pengiklan mengurangi sikap kritis dan independensi editorial?

Ada kekhawatiran kerja sama dengan pemerintah dan pengiklan mengurangi sikap kritis dan independensi editorial. Skor 2,00 menunjukkan hal itu. Tekanan itu dapat muncul dalam bentuk permintaan mengubah atau menghapus berita, hingga ancaman penghentikan kerja sama. Independensi editorial juga perlu dilindungi dari ketergantungan ekonomi.

Keterbukaan dan Ketersediaan Informasi Publik

Apakah seluruh informasi publik tersedia secara real-time, transparan, dan dalam format digital yang mudah diolah oleh jurnalis untuk kepentingan audit publik?

Skor 2,06 menggambarkan akses informasi publik yang *real time*, transparan dan dalam formal digital yang mudah diolah oleh jurnalis untuk kepentingan publik masih belum optimal. Bagi media keterbukaan informasi juga dimaknai apakah informasi tersebut mudah diakses bukan sekadar tersedia. Karena hal ini akan berpengaruh terhadap kemampuan media melakukan fungsi konrol dan audit publik. Keterbukaan informasi ini biasanya terkait anggaran, kebijakan pemerintah dan pelayanan publik.

Apakah terdapat portal data terbuka (Open Data) yang cukup lengkap dan mudah diakses?

Hasil asesmen menunjukkan skor 2,30. Ini menggambarkan keberadaan portal data terbuka belum cukup lengkap dan belum mudah digunakan oleh media. Jurnalisme berbasis data biasanya memanfaatkan portal data pemerintah. Portal data ini menjadi bermanfaat jika ada kelengkapan data, pembaruan data, keterbacaan format dan mudah diakses. Jadi tidak hanya sebatas ada tetapi juga kualitas data dan kegunaan data sehingga dapat dimanfaatkan jurnalis untuk melakukan investigasi dan diaudit publik.

Kebijakan Pemerintah yang Mendukung Kebebasan Digital

Apakah terdapat regulasi yang jelas mendukung ekosistem digital dan perlindungan data pribadi?

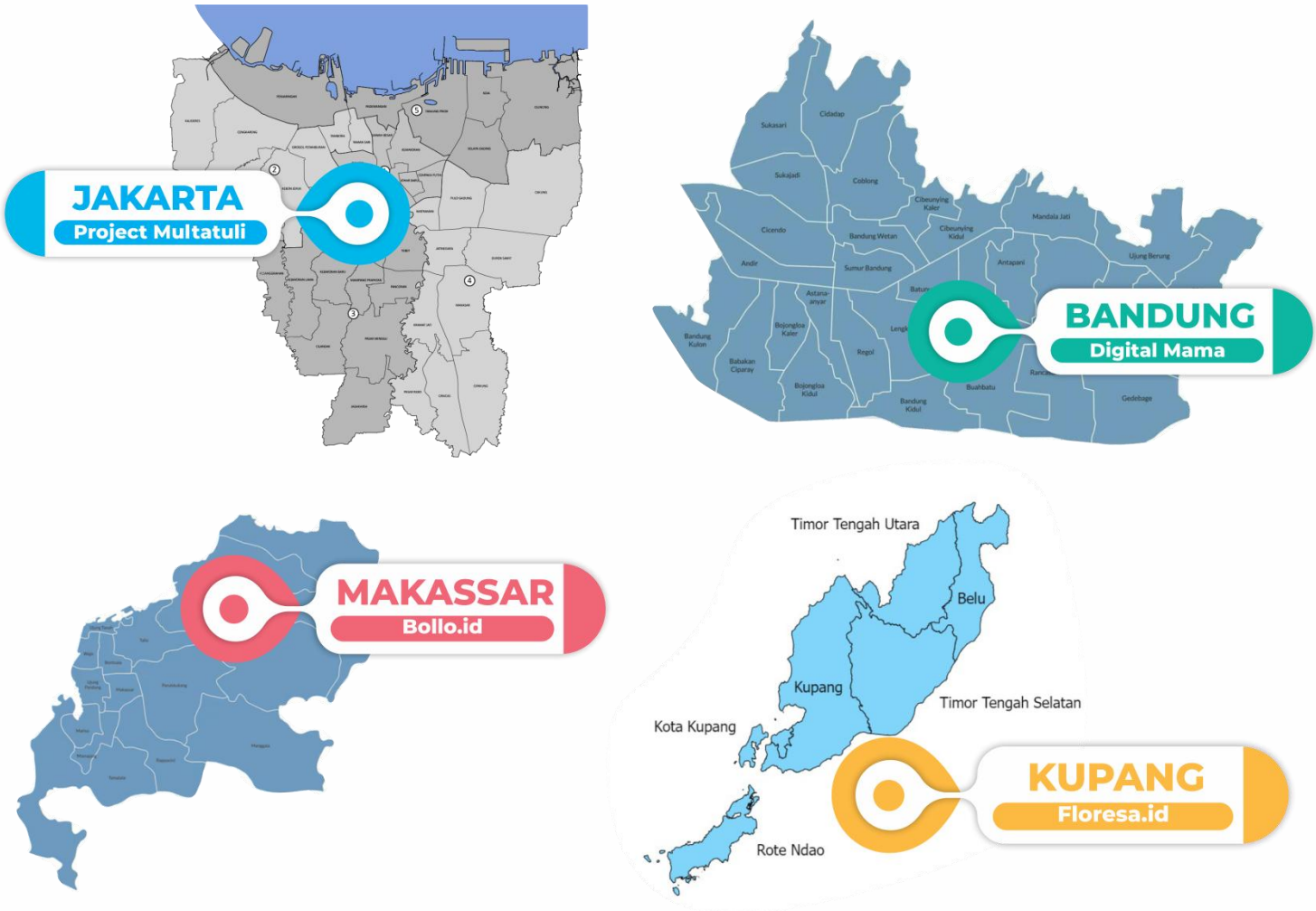
Skor 2,19 menunjukkan keberadaan regulasi mengenai ekosistem digital dan perlindungan data pribadi belum sepenuhnya dipandang memberikan kepastian dan dukungan yang kuat bagi kerja media. Indonesia telah memiliki kerangka hukum terkait perlindungan data pribadi dan tata kelola ruang digital, tetapi tantangannya adalah memastikan penerapan regulasi tetap melindungi hak digital sekaligus tidak menghambat kebebasan pers dan akses publik terhadap informasi. Dengan demikian, kepastian regulasi perlu diikuti dengan implementasi yang transparan, proporsional dan memberikan ruang yang jelas bagi kerja jurnalistik.

Apakah pemerintah telah mengakui hak digital dan aktif merespons terjadinya kekerasan atau peretasan terhadap jurnalis?

Hasil asesmen menunjukkan skor 1,62 ini menggambarkan respons pemerintah dinilai lemah dalam melindungi hak digital dan menangani kekerasan atau peretasan terhadap jurnalis. Hasil riset AJI 2025 mencatat ada 29 kasus serangan digital terhadap media dan jurnalis baik dalam bentuk pembekuan akun, doxing, peretasan akun. Serangan digital menjadi bentuk ancaman yang semakin nyata. Perlindungan jurnalis membutuhkan penanganan dan pemulihan yang cepat ketika serangan digital terjadi, tidak hanya respons normatif.

Apakah pemerintah tidak melakukan penyensoran, pemblokiran media, dan kriminalisasi terhadap jurnalis digital?

Skor 1,81 menunjukkan ekosistem digital masih dipersepsikan belum sepenuhnya bebas dari risiko penyensoran, pemblokiran media dan kriminalisasi jurnalis di ranah digital. Ancaman ini tidak hanya berbentuk pemblokiran secara langsung tetapi berupa tekanan penghapusan konten, intimidasi, serangan digital. Perlindungan kebebasan pers di era digital harus mencakup perlindungan konten, jurnalis, infrastruktur digital.



BAB IV
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

BAB IV
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Secara umum terdapat kondisi indeks keberlanjutan media alternatif yang rendah di Indonesia. Dari enam indikator media viability, tak ada yang berada di skala *viable*. Terdapat dua posisi semi-viable (konten, pelibatan publik, adaptasi teknologi) dan less viable (organisasi, finansial dan perlindungan hukum) pada enam indikator sebagai berikut:

1. Konten berkualitas

Dari enam indikator keberlanjutan media alternatif, hasil asesmen di empat kota di Indonesia menunjukkan konten berkualitas meraih skor tertinggi rata-rata nasional 3,2. Angka ini masih tergolong dalam *semi-viable*, meski sedikit saja di bawah ambang *viable* (3,26-4,00). Bandung menjadi kota dengan nilai tertinggi di 3,5, disusul Kupang di 3,3.

Hasil asesmen ini menegaskan bahwa sejak awal media-media alternatif memilih jurnalisme berkualitas yang memprioritaskan kepentingan publik sebagai fondasi pendirian, lalu merawatnya di sepanjang perjalanannya. Kesadaran tentang nilai-nilai demokrasi dan HAM tertanam di organisasi. Yang masih menjadi tantangan adalah pembakuan panduan di jenjang internal dan kebutuhan publik di jenjang eksternal.

2. Pelibatan publik

Hasil asesmen di empat kota di Indonesia menunjukkan indikator pelibatan publik meraih skor rata-rata nasional 3,0. Angka ini tergolong dalam kategori *semi-viable*, yang cakupannya merentang dari 2,51 hingga 3,25. Bandung menjadi kota dengan nilai tertinggi di 3,4, disusul Jakarta di 3,0.

Hasil asesmen ini menegaskan bahwa pelibatan publik menjadi strategi utama media alternatif untuk bertahan dan tumbuh. Lewat pilihan ini, media alternatif berupaya memperbesar dampak sekaligus membuka peluang-peluang pendanaan. Pelibatan publik bukan hanya berupa penyediaan wadah bagi mereka untuk berkomentar atas artikel tapi juga ajakan untuk terlibat secara langsung dalam pertemuan-pertemuan yang digelar rutin. Yang masih menjadi tantangan adalah pembakuan panduan di tingkat internal dan dukungan regulasi yang kuat di tingkat eksternal.

3. Penguatan organisasi

Para pengelola media alternatif adalah jurnalis cum aktivis. Mereka adalah individu-individu yang selama ini sudah mempunyai pengalaman ber jurnalisme dan beraktivisme. Jadi secara umum, para pengelolanya sudah mempunyai pengalaman dalam membangun dan menguatkan organisasi. Namun apakah para pengelola media sudah menyediakan perangkat organisasi yang memadai seperti menyediakan jaminan sosial untuk jurnalis, memenuhi hak ketenagakerjaan, skema perlindungan jurnalis? Nilainnya adalah 2.7 atau *semi viable*. Jakarta, Bandung dan Kupang mempunyai nilai semi-viable, hanya Makassar yang mendapatkan nilai *less viable.*

4. Keberlanjutan finansial

Dari seluruh hasil asesmen, keberlanjutan finansial mendapatkan penilaian *less-viable*, penilaian ini juga merupakan nilai terendah dari semua indikator dalam asesmen ini, yaitu 2.4 dengan rincian penilaian Jakarta (2.1/ less viable), Bandung (2.8/ semi viable), Makassar (2.0/ less viable) dan Kupang (2.6/ semi viable). Hasil ini juga menunjukkan bahwa keberlanjutan finansial merupakan persoalan serius yang harus diatasi media alternatif. Masalah finansial utama pada media alternatif yaitu masih mencarinya model bisnis yang stabil, tidak adanya ceruk dana yang umumnya sudah diisi oleh media mainstream yang menyebabkan ketergantungan pada pendanaan yang sangat terbatas. Hal ini juga terlihat seperti dalam sulitnya menarik sponsor/iklan, dana yang masih mengandalkan hibah/ grant dan minimnya variasi sumber dana.

5. Adaptasi teknologi

Dalam hal adaptasi teknologi, media alternatif di Indonesia berada pada skor agregat nasional sebesar 2,6, pada kategori *Semi-Viable*. Angka ini berada di ambang bawah rentang kelayakan (2,51-3,25), hanya sedikit di atas kriteria *Less Viable*.Skor ini menggambarkan situasi transisi yang rentan. Bisa dikatakan, sebagian besar ruang redaksi alternatif telah mengadopsi perangkat digital dasar untuk memproduksi dan mendistribusikan konten, namun belum memiliki kedaulatan infrastruktur teknologi yang kokoh untuk menjamin keberlanjutan dan independensi jangka panjang. Kondisi *Semi-Viable* ini juga menyisakan kerentanan struktural terhadap keamanan digital dan independensi informasi. Tanpa infrastruktur komputasi mandiri dan sistem pertahanan siber yang terlatih, media alternatif rentan mengalami sensor digital, peretasan, hingga penutupan sepihak (*deplatforming*) saat mengangkat isu-isu publik yang bersinggungan dengan kepentingan politik dan ekonomi mapan. Akses teknologi yang belum sepenuhnya berdaulat membuat posisi tawar media relatif lemah ketika menghadapi represi digital.

Secara keseluruhan, angka 2,6 menjadi alarm bahwa adaptasi teknologi media alternatif di tingkat nasional belum bergerak ke arah resiliensi sejati. Tanpa adanya strategi penguatan kapasitas infrastruktur, media alternatif berisiko terus berada di tepi jurang *Less Viable*.

6. Perlindungan hukum dan keterbukaan informasi

Pada indikator pengakuan, perlindungan hukum dan keterbukaan informasi memperoleh skor nasional 2,4, dalam kategori *less viable*. Dalam menjalankan operasionalnya, media alternatif masih menghadapi tantangan untuk memperoleh pengakuan formal, perlindungan hukum, menjalankan kebebasan berekspresi serta akses informasi publik. Kondisi ini salah satunya tercermin dari proses verifikasi di Dewan Pers. Tidak semua media alternatif memiliki kapasitas yang bisa untuk memenuhi persyaratan verifikasi. Verifikasi di Dewan Pers meliputi, verifikasi administrasi antara lain tentang aspek badan hukum, struktur organisasi, ketenagakerjaan, konten dan verifikasi faktual.

Belum adanya pengakuan hukum serta perlindungan hukum, membuat kondisi media cukup rentan. Media dan jurnalis masih menghadapi risiko intimidasi, kekerasan, serangan digital dan juga tekanan pemberitaan. Laporan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) pada 2025, cukup menggambarkan realitas kerentanan tersebut. Laporan menyebutkan adanya 89 kasus kekerasan terhadap jurnalis sepanjang 2025, termasuk 29 kasus serangan digital. Di sisi lain, keterbukaan ruang digital juga masih menjadi persoalan. Pada 22 Juli 2026, AJI, SAFEnet, Magdalene.co, dan Project Multatuli mengajukan uji materi terhadap PP 71/2019 terkait moderasi konten karena dinilai berpotensi mengancam kebebasan berekspresi dan hak atas informasi.

Idealnya keberlanjutan media alternatif tidak hanya ditopang dari kondisi (kapasitas) internal media, namun juga ekosistem yang mendukung. Baik itu ekosistem perlindungan hukum, keterbukaan informasi, serta kebijakan ruang digital yang lebih aman.



Berdasarkan temuan dan analisis dari kerja asesmen ini, maka ada beberapa rekomendasi yang perlu dilakukan oleh para pihak terkait sebagai berikut:

Rekomendasi

1. Pengelola media alternatif agar terus mempertahankan kualitas konten sebagai pilar yang membangun kepercayaan publik, antara lain melalui penguatan kerja jurnalisme yang kolaboratif, dan gerakan aktivisme/advokasi kasus pasca publikasi berita. Interrelasi antara berita dengan aktivisme menjadi ciri khas keberlanjutan media ini di Indonesia.

2. Dua kondisi yang masih buruk, yaitu perlindungan hukum dan keberlanjutan dari sisi finansial harus mendapat perhatian serius dari para pihak di luar media alternatif. Pemerintah melalui Dewan Pers harus mengupayakan verifikasi dan legalitas media alternatif agar setara dan aman dengan media arus utama ketika menjalankan tugas jurnalistik. Keberadaan dana abadi untuk jurnalisme (*trusted fund/endowment fund for journalism*) mendesak, dalam upaya mengurangi ketergantungan pembiayaan media alternatif dari donor internasional, perusahaan komersial dan dana hibah pemerintah yang memiliki resiko politik. Keberlanjutan finansial juga harus dijamin melalui pendampingan ketrampilan manajemen keuangan, pengembangan model bisnis yang khas bagi media alternatif dan membangun jejaring internasional.

   Terhadap dua hal ini, negara melalui regulasi dan infrastruktur yang tidak memengaruhi independensi media harusnya hadir. Berbagai regulasi yang menghambat, seperti UU ITE, UU Perlindungan Data Pribadi dan UU terkait lainnya mutlak ditinjau kembali. Asesmen ini turut mengkonfirmasi terjadinya diskriminasi perlakuan atas media alternatif yang mengusung berita berkualitas/investigatif dengan media arus utama komersial.

3. Model partisipasi publik yang cukup baik harus terus dikembangkan lewat sistem komunitas pembaca/pelanggan, peer-journalist, dan sebagainya. Adaptasi teknologi masih relatif rendah dan tidak merata antar media alternatif, terutama dalam memitigasi seragan digital. Oleh karenanya diperlukan intervensi pelatihan dan instalasi teknologi digital.

   Asesmen ini memiliki kelemahan utama keterbatasan objek studi pada media alternatif dan media yang berlokasi di empat kawasan tertentu sebagai pilot projek. Ke depan dan agar bisa memotret situasi keberlanjutan media lebih holistik, perlu asesmen yang menjangkau data media alternatif atau media arus utama lebih meluas ke seluruh Indonesia.

Daftar Pustaka

Deutsche Welle (2020). *Media Viability Index*. Bonn: Deutsche Welle.

George, J, dan Leidner, D. (2019). From Clictivism to Hacktivism: Understanding Digital Activism. *Information and Organization,* Vol. 29 (3). https://doi.org/10.1016/j.infoandorg.2019.04.001

Herman, E., & Chomsky, E. (1988). *Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media*. New York: Pantheon Books.

Karasova, E. (2023) *Mainstream Versus Alternative Media. Megatrend and Media.* Diakses dari laman: https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/475358

Lugo-Ocando, J. and Requejo-Aleman, J.L. (2014) Assessing the Sustainability of Latin

American Investigative Non-profit Journalism. *Journalism Studies*, 15 (5). pp.

Masduki (2023). *How to save Indonesia's Independent media voices*. Diakses dari laman: https://www.eco-business.com/id/opinion/how-to-save-indonesias-independent-media-voices/

Masduki, dkk. (2024). *Kepemilikan dan Afiliasi Politik Media di Indonesia.* Yogyakarta: PR2Media dan Internews Indonesia.

Nurhajati, L., Afrida, N. dan Nur Aini (2023). *Kolaborasi Menolak Mati: Pemetaan Kondisi Media Perempuan di Indonesia.* Jakarta: Konde.co dan Google News Initiative.

Scott, Bunce & Wrigt. (2019). *Foundation Funding and the Boundaries of Journalism*. Journalism Studies. Vol. 20 (6), pp. 1-19.

Trere, E dan Kaun, E. (2021). Digital Media Activism: A Situated, Historical, and Ecological

Approach beyond the Technological Sublime. Oldenbourg: De Gruyter

Wiesand, A. (2016). Investigative Journalism. Investigative Journalism. In Weisand, Chainuglou, Simon (eds.). *Culture and Human Rights: The Wroclaw Commentaries*. doi: 10.1515/9783110432251-089.

Bahan Bacaan

- "Measuring Beyond Money: The Media Viability Indicators (MVIs)" (DW Akademie): This framework presents a comprehensive set of indicators to assess media viability across five societal dimensions: economics, politics, content and expertise, technology, and the community. It provides a structured approach for data gathering and comparison.

- "Rethinking Media Viability in the Digital Age" (DW Akademie Discussion Paper): This paper argues for a broader view of media viability beyond just financial aspects, discussing how digital transformation has disrupted traditional business models.

- "Draft Indicators for Media Viability" (UNESCO): This document outlines a potential sixth category of indicators for media viability as an addition to UNESCO's existing Media Development Indicators (MDI) framework, focusing on the economic, financial, and business aspects.

- "The Media Viability Manifesto" (mediaviabilitymanifesto.org): A common framework for action developed by the global media development community that emphasizes tailor-made solutions based on specific contexts and a joint understanding of media viability.

ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN
Alliance of Independent Journalist

IFJ

BBC MEDIA ACTION

brave media
SUPPORTING INDEPENDENT MEDIA WORLDWIDE

Co-funded by the European Union

DAYA TAHAN, RISIKO DAN TANTANGAN KE DEPAN:

Laporan tentang Keberlanjutan Media di Indonesia

(Risk, Resilience and Futures: A Report on Media Viability in Indonesia)



Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, 2026
Jl. Kembang Raya No 6 Kwitang, Senen, Jakarta Pusat
Daerah Khusus Jakarta 12820
Telepon : (6221)3151214, Fax (6221)3151261
E-mail : sekretariat@ajiindonesia.or.id
Web : www.aji.or.id